

**POSITIONING POLITIK CALEG PEREMPUAN
PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 DI SUMENEP**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Sosial (S.Sos)

Oleh :

Miftahol Arifin
NIM. 10720029

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahol Arifin
NIM : 10720029
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya atau penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 12 Januari 2015

Yang bersangkutan,



Miftahol Arifin

NIM. 10720029

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miftahol Arifin

NIM : 10720029

Prodi : Sosiologi

Judul : ***POSITIONING* POLITIK CALEG PEREMPUAN PADA
PEMILU LEGISLATIF 2014 DI SUMENEP**

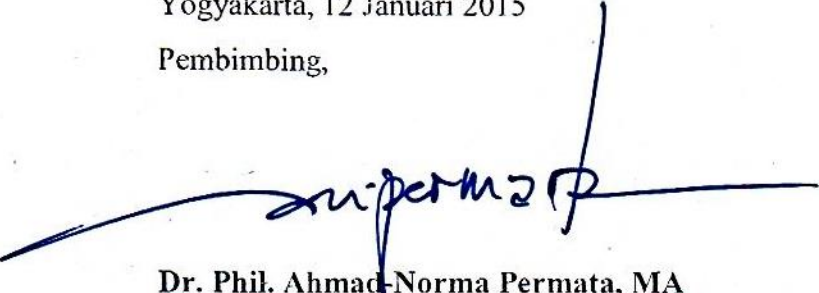
Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu sosiologi.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2015

Pembimbing,



Dr. Phil. Ahmad-Norma Permata, MA

NIP. 19711207 200901 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)585300; Fax. (0274)519571; email: fishum@uin-suka.ac.id
YOGYAKARTA 55281



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/ 0186 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**POSITIONING POLITIK CALEG PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 DI
SUMENEP**

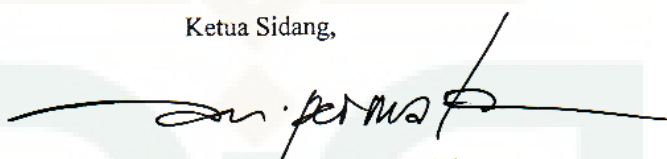
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: Miftahol Arifin
NIM	: 10720029
Telah dimunaqasyahkan pada	: Senin, 26 Januari 2015
Nilai Munaqasyah	: 95 (A)

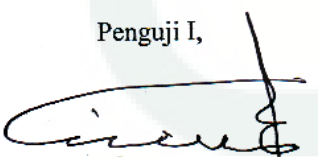
dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH

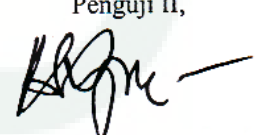
Ketua Sidang,


Dr. Phil. Ahmad-Norma Pertama, M.A.
NIP 19711207 200901 1003

Penguji I,


Achmad Zainal Arifin, S.Ag., M.A., Ph.D.
NIP 19751118 200801 1 013

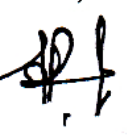
Penguji II,


Dr. Yayan Suryana, S.Ag., M.Ag.
NIP 19701013 199803 1 008



Yogyakarta, 9 Pebruari 2015

Dekan,


Prof. Dr. Dudung Abdurahman, M.Hum.
NIP 19630306 198903 1 010

MOTTO

Khoirun al-nas anfa'uhum li al-nas

"Paling baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain"

[QS:]

**"DUNIA INI SEPERTI CERMIN. LIHAT SAJA.
TERSENYUMLAH DAN TEMAN ANDA AKAN
TERSENYUM BALIK"**

^_^)-

PERSEMBAHAN

Skripsiku ini ku persembahkan untuk:

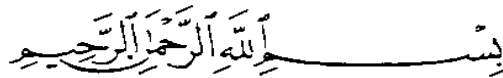
*Keluargaku yang ku sayang, terkhusus Ibu dan Ayah tercinta, Ibu Atwiyah dan Bapak
Massuni... Sekarang anakmu ini sudah menjadi sarjana
Semoga membanggakan kalian...*

Adik kecilku yang lucu, Ahmad Khairil Ibad (Ariel)...

Dan,

*Almamaterku yang ku banggakan, Prodi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta...*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena limpahan rahmat dan karunia – Nya, penyusun masih diberikan kesempatan untuk menunaikan dan menyelesaikan karya sederhana ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, karena usaha keras beliau, cahaya Tuhan sampai ke hati kita semua.

Skripsi yang berjudul **“Positioning Politik Caleg Perempuan pada Pemilu Legislatif 2014 di Sumenep”** ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Sosiologi (S.Sos) di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, MA. Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Dudung Abdurrahman, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

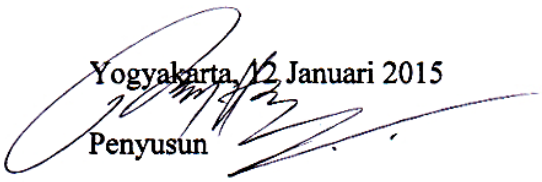
3. Bapak Dadi Nurhaedi, S. Ag., M.Si, selaku Ketua Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dosen Penasehat Akademik, Ibu Ambar Sari Dewi, S.Sos., M.Si, terima kasih atas segala arahan dan bimbingan selama menjadi menjalani kuliah.
5. Bapak Dr. Phil.Ahmad-Norma Permata, MA, selaku pembimbing skripsi. Terima kasih banyak atas arahan, bimbingan, koreksi, kritik, dan saran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Dosen Penguji, Dr. Achmad Zainal Arifin, MA., dan Bapak Dr. Yayan Suryana, M.Ag. terima kasih atas saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga apa yang telah diajarkan kepada saya memberikan banyak manfaat baik di dunia dan di akhirat. Semoga senantiasa diberikan pahala yang terus mengalir oleh Allah SWT.
8. Ibu dan Ayah. Terima kasih atas kasih sayang, didikan, nasihat, dukungan, dan bantuan serta do'a yang senantiasa kalian limpahkan. Maaf apabila masih banyak menyusahkan kalian. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan yang terbaik kepada kalian, dan semoga saya dapat segera membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Amin.

9. Keluarga besar, Adik Ariel, Sepupu Ima dan Aqien, Paman Munahwai, Bibi Alwani dan seluruh keluarga dimana pun berada. Terima kasih sudah turut memberikan do'a dan menjadi penyemangat.
10. Para sahabat, rekan dan teman, Dafa, Tri, Budi, Eby, Panggih dan Ali. Terimakasih telah turut memberikan kritik dan masukan yang membangun pada penelitian ini. Terima kasih juga untuk persaudaraan dan pertemanan yang indah ini.
11. Teman – teman seperjuangan Sosiologi 2010 pada umumnya yang tidak dapat disebut satu persatu. Terima kasih untuk dukungan dan canda tawa bersama kalian.
12. Teman teristimewa, teman berbagi suka dan duka, Tanti Setyaningsih, S.I.Kom. Terima kasih banyak atas pengertian, motivasi, kritik, dukungan dan do'a tulus yang telah diberikan.
13. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna. Oleh karena itu diperlukan saran dan kritik yang bersifat membangun. Harapan penyusun, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca dan memberikan inspirasi untuk lebih mendalami kajian keilmuan pada bidang teks media. Amin.

Yogyakarta, 12 Januari 2015

Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR SKEMA	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Tinjauan Pustaka	16
E. Landasan Teori	23
F. Metode Penelitian	35

G. Sistematika Pembahasan	41
BAB II : KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SUMENEP	
A. Letak dan Histori Sumenep	42
B. Potret Kehidupan Masyarakat	46
C. Status dan Posisi Perempuan	60
D. Profil Caleg Perempuan Terpilih	68
BAB III : PEREMPUAN DI KANCAH POLITIK SUMENEP	
A. Sekilas Politik Perempuan di Sumenep	71
B. Representasi Perempuan pada Pemilu 2014	83
C. Motif dan Pola Gerakan Politik Perempuan	95
BAB IV : POSITIONING POLITIK CALEG PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2014	
A. Segmentasi dan Pilihan Partai Politik	103
B. Pemilu 2014 dan <i>Positioning</i> Politik	110
1. Sumber dan Implementasi <i>Positioning</i> Politik	112
2. Perbandingan Antarcaleg Perempuan	130
C. Konstruksi Gender dalam <i>Positioning</i> Politik	138
D. Peran Partai Politik dan Tim Sukses	149
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	156
B. Saran-Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN – LAMPIRAN	166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Sumenep	43
Gambar 2. Sistem Kekerabatan Masyarakat Sumenep	55
Gambar 3. Peta Pembagian Dapil dan Alokasi Kursi	85
Gambar 4. Tiga Caleg Perempuan Terpilih Pemilu 2014	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Persentase Jumlah Anggota Parlemen Antarnegara	7
Tabel 2. Perbandingan Persentase Jumlah Anggota DPR Menurut Jenis Kelamin Hasil Pemilu 1955-2014	8
Tabel 3. Partai Politik Peserta Pemilu 2004	78
Tabel 4. Partai Politik Peserta Pemilu 2009	80
Tabel 5. Partai Politik dan Jumlah Calon Pemilu 2014	83
Tabel 6. Perbandingan Jumlah Persentase Perempuan dalam DPRD Sumenep Pemilu 2004-2014	86

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu 2014	89
--	----



DAFTAR SKEMA

Skema 1. Model <i>Positioning</i> Politik	29
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Responden	167
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan (<i>Interview</i>)	168
Lampiran 3. Caleg Perempuan Terpilih Pemilu 2004	171
Lampiran 4. Caleg Perempuan Terpilih Pemilu 2009	173
Lampiran 5. Caleg Perempuan Terpilih Pemilu 2014	174
Lampiran 6. Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2014	177
Lampiran 7. Susunan Fraksi-Fraksi DPRD Sumenep	178
Lampiran 8. Susunan Keanggotaan dalam Alat Kelengkapan DPRD Sumenep	180
Lampiran 9. <i>Curriculum Vitae</i>	183

ABSTRAK

Pemilu Legislatif 2014 ternyata masih menyisakan persoalan, yaitu rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen. Kendati tuntutan kuota keterwakilan perempuan 30% sebagaimana diamanatkan undang-undang pemilu dan partai politik, nyatanya masih jauh dari yang diharapkan. Padahal, representasi perempuan merupakan elemen penting untuk membangun demokrasi yang ramah gender (*gender democracy*). Di Kabupaten Sumenep, dari 202 caleg perempuan yang maju pada Pemilu Legislatif 2014, hanya 3 orang yang lolos ke parlemen yakni Dwita Andriani (PAN dapil 1), Ummul Hasanah (PDI Perjuangan dapil 2) dan Zulfah (Gerindra dapil 3). Artinya, dari total 50 kursi yang ada di DPRD Sumenep hanya 3 kursi yang diisi oleh wakil perempuan. Hasil tersebut tidak ada peningkatan dari Pemilu Legislatif 2009, sama-sama 3 caleg perempuan yang terpilih.

Oleh sebab itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memotret rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen Sumenep dengan fokus pembahasan yaitu *positioning* politik perempuan pada Pemilu Legislatif 2014. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana *positioning* politik caleg perempuan, termasuk pula bagaimana pengaruhnya terhadap lolosnya mereka ke parlemen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teori *positioning* politik dan teori gender. Responden dalam penelitian ini adalah tiga caleg perempuan terpilih, beberapa caleg perempuan tidak terpilih, caleg periode sebelumnya, pengamat dan wartawan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi, serta menggunakan teknik deskriptif-analitik sebagai metode analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *positioning* politik menjadi faktor penting bagi caleg perempuan pada pemilu 2014 di Sumenep. Strategi *positioning* politik membantu mereka membangun citra dan sebagai pembeda dari lawan-lawan politiknya guna memperoleh segmen terbesar di mata pemilih. Dalam praktiknya, strategi *positioning* politik itu berpengaruh banyak terhadap kemenangan beberapa caleg perempuan seperti Dwita Andriani, Ummul Hasanah dan Zulfah. Adanya posisi perempuan yang masih subordinat dan kultur patriarki yang masih kuat di masyarakat menjadikan strategi *positioning* politik semakin urgen keberadaannya. Strategi tersebut diperlukan untuk melawan hegemoni politik patriarki yang ada di masyarakat. Hal itu juga untuk memperbesar peluang perempuan lolos ke parlemen.

Sumber *positioning* politik yang digunakan oleh caleg perempuan adalah: (1) kualitas dan kemampuan diri, (2) kharisma dan ketokohan, (3) visi-misi dan program kerja dan (4) *track record* dan pengalaman. Sedangkan implementasinya berupa *blusukan* atau silaturahmi kepada kelompok dan tokoh masyarakat dan kegiatan sosial yang berupa pemberian bantuan gratis kepada masyarakat. Faktor-faktor yang menghambat strategi *positioning* politik adalah: (1) kultur patriarki, (2) peran ganda perempuan, (3) kurangnya keberanian perempuan dan (4) mahal biaya kampanye politik.

Kata kunci: positioning politik, perempuan, pemilu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan memiliki peran dan posisi penting dalam pembangunan suatu negara. Dalam Pasal 27 UUD 1945 disebutkan, kedudukan perempuan sederajat dengan laki-laki di bidang hukum dan pemerintahan. Dalam perundang-undangan politik yang tertera dalam UUD tersebut telah tercermin bahwa kaum perempuan sama hlmnya dengan laki-laki, memiliki hak untuk memilih dan dipilih.¹ Itu artinya, peran perempuan dalam politik dan pemerintahan sudah dijamin oleh konstitusi. Lebih-lebih di alam demokrasi seperti Indonesia, tuntutan keterlibatan perempuan dalam pembangunan menjadi suatu konsekuensi logis guna mewujudkan kehidupan negara yang partisipatoris, yakni menjamin setiap warga negaranya berperan aktif dalam pembangunan. Keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga negara seperti halnya parlemen merupakan tuntutan yang harus dilakukan jika ingin membangun Indonesia dengan sistem yang benar-benar demokratis.²

¹ Lihat UUD 1945 Pasal 27 tentang kedudukan perempuan yang sama dengan laki-laki dalam bidang hukum dan pemerintahan.

² Dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi politik perempuan menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Bahkan, tuntutan representasi perempuan bukan semata soal demokratisasi, tetapi juga untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, egaliter dan akuntabel. Demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang memperjuangkan kepentingan kelompok “tertindas” seperti perempuan. Lihat Sri Wahyuni dan Hedwigis Esti R., “Pandangan Publik tentang Keputusan Perempuan dalam Kancan Politik Indonesia” dalam Siti Hariti Sastriyani, *Gender and Politics*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), hlm 201.

Di tingkat internasional, tuntutan akan kesetaraan dan keadilan *gender*³ dalam politik sesungguhnya sudah sejak lama digelorakan oleh PBB. Sejak tahun 1990, melalui salah satu divisinya, UNDP (*United Nation Development Program*) telah memperkenalkan indikator baru untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara, yaitu GDI (*Gender Development Index*) dan GEM (*Gender Empowerment Measure*). GDI adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam urusan hidup, pendidikan dan jumlah pendapatan, sedangkan GEM untuk mengukur kesetaraan dalam hlm partisipasi politik.⁴ Di Indonesia, sudah sejak lama pula telah dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan.⁵ Bahkan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan

³ Istilah *gender* dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*gender*". Dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas dibedakan pengertian antara *sex* dan *gender*. John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm 265. Namun, banyak pengamat mengartikan *gender* sebagai suatu ciri yang berbeda dengan *sex*, seperti Robert Stoller (1968) yang memakai istilah *gender* untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Ilmuan sosial lain seperti Ann Oakley (1972) mengartikan *gender* sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. Sementara Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) mengartikan *gender* adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Pengertian dari pengamat tersebut dapat dilihat dalam Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hlm 1 – 4. Kaum Marxian mengartikannya agak radikal sebagai konstruksi kelas sosial yang dibalik itu ada kepentingan dominasi dan menindas. George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (terj.), (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 432 – 433. Liha pula Ihsanudin, *Tan Malaka dan Revolusi Proletar*, (Yogyakarta: Resist Book, 2010), hlm 90.

⁴ Lihat Megawangi dalam Heriyani Agustina, "Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender" dalam Siti Hariti Sastriyani, *Op. Cit.*, hlm 168.

⁵ Indonesia memulai konsep kesetaraan gender paling tidak sejak tahun 1995 setelah delegasi Indonesia bersama delegasi berbagai negara lainnya menghadiri Konferensi Perempuan Sedunia ke-4 di Beijing 1995 dan meratifikasi dukungan Indonesia dalam meletakkan kesetaraan gender dalam pembangunan manusia. Beberapa diantaranya yang sudah dilakukan pemerintah adalah (1) program pemberdayaan perempuan yang tercantum dalam GBHN dan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), (2) Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, (3) membentuk Kementerian Negara urusan perempuan yang sekarang dikenal dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), dan (4) mendirikan organisasi sebagai wadah partisipasi perempuan seperti Dharma Wanita, PKK, dan sebagainya. Lihat Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi...*, hlm 211 dan lihat juga Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999 – 2001*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), hlm 15.

telah ditetapkan UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang telah memberikan mandat kuota minimal 30% untuk partisipasi perempuan di parlemen dan sudah diberlakukan sejak Pemilu 2004.

Pasal 8 butir d UU Nomor 10 Tahun 2008 tersebut menyebutkan bahwa 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan partai untuk dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu, Pasal 53 juga menyatakan daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Sementara di Pasal 2 ayat 3 disebutkan pendirian dan pembentukan partai menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, di Pasal 20 tentang kepengurusan partai disebutkan juga tentang penyusunannya yang harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%. Dengan demikian, tuntutan kuota 30% keterwakilan perempuan sesungguhnya sudah secara jelas diamanatkan konstitusi mulai dari lingkup pendirian partai, kepengurusan partai, penyusunan daftar caleg dan keterwakilan di parlemen.⁶

Lahirnya kebijakan kuota tersebut tentunya bukan tanpa dasar. Keterlibatan perempuan dalam politik dianggap penting karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami dengan baik oleh perempuan sendiri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain adalah kesehatan reproduksi, masalah kesejahteraan keluarga, masalah kesehatan dan

⁶ Ririn Tri Nurhayati, "The Influence of International Norms on Gender Equality in the Advancement of Women's Political Participation in Indonesia" dalam Siti Hariti Sastriyani, *Op. Cit.*, hlm 133.

pendidikan anak, kebutuhan manusia lanjut usia dan isu-isu kekerasan seksual.⁷ Selain itu keikutsertaan perempuan sebagai pengambil keputusan politik juga dapat mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat.⁸ Kepedulian pada kepentingan perempuan bisa diakomodasi secara optimal bila perempuan tampil menjadi bagian dari pembuat kebijakan. Karena itu, John Stuart Mill (1861) sebagaimana dikutip oleh Fink menjelaskan bahwa dalam prinsip liberalisme sosialnya membela dengan gigih kesetaraan hak politik perempuan sebagai bagian dari terwujudnya partisipasi demokratis.⁹

Keterlibatan perempuan dalam politik dapat memperbaiki masalah-masalah yang seringkali menghambat pembangunan. Hasil studi Bank Dunia tahun 1999 – 2000 menunjukkan: (1) negara yang punya derajat kesetaraan gender tinggi relatif punya tingkat kemajuan kehidupan yang tinggi pula, (2) tingginya kesetaraan gender paralel dengan kualitas pengelolaan administrasi publik atau *good governance*, (3) kesetaraan gender korelasi dengan tingkat penurunan korupsi, dan (4) kesetaraan gender menjadi ciri-ciri masyarakat egaliter dan partisipatoris sehingga memungkinkan *chek and balances* yang mengarah pada pemerintahan yang bersih.¹⁰

⁷ Yayasan Jurnal Perempuan, *Modul Perempuan untuk Politik*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan Ausaid, 2004), hlm 3 – 6. Lihat juga Joni Lovenduski, *Politik Berparas Perempuan* (terj.), (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm 38.

⁸ Fatmariza, “Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Sumatera Barat Pasca Kuota 30%” dalam Jurnal *DEMOKRASI*, Vol. IV No. 1 Tahun 2005.

⁹ Hans Fink, *Filsafat Sosial: dari Feodalisme hingga Pasar Bebas* (terjemahan Sigit Djatmiko), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 117.

¹⁰ Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi...*, hlm 3 – 4.

Dengan demikian, lahirnya kuota perempuan minimal 30% melalui UU tersebut sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan.¹¹ Secara eksplisit UU tersebut telah mengakomodir pentingnya keterwakilan perempuan dalam parlemen agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga bisa menjadi angin segar bagi terwujudnya kesetaraan gender dalam dunia politik. Ruang gerak perempuan untuk terlibat dalam proses politik di parlemen dapat terbuka lebar dan tentu saja hal ini juga bisa menjadi *bergaining power* bagi kaum perempuan untuk mendapatkan peran yang lebih baik dalam ruang publik.¹² Maka dari itu, dengan adanya penetapan kuota tersebut ada jaminan bahwa penyertaan 30% perempuan di dalam keanggotaan parlemen akan secara otomatis mengubah paradigma parlemen untuk berpihak kepada perempuan.

Namun, realitas representasi perempuan di parlemen sampai saat ini tetap saja masih rendah. Kendati sudah ada UU yang mengamanatkan kuota minimal 30%, keterwakilan perempuan di parlemen (DPR/DPRD) faktanya masih jauh dari yang diharapkan. Hingga Pemilu 2014, perjuangan itu belum mencapai hasil

¹¹ Tentu saja lahirnya kuota 30% tidak boleh hanya dipahami sebagai berita baik, tetapi juga sebagai tuntutan dan tantangan bagi kaum perempuan. Mereka dituntut untuk turut serta berpartisipasi dalam politik. Karenanya, mereka mesti memiliki kualitas dan kaabilitas agar mampu bersaing dengan laki-laki untuk masuk ke parlemen. Kendati hanya 30%, tetapi hlm itu bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi perempuan. Sebagai tantangan, keberadaan kuota bagi perempuan ternyata di banyak negara sangat efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Keterangan lebih lanjut lihat Nadezha Shedova, "Kendala-kendala terhadap Partisipasi Perempuan dalam Parlemen," dalam Julie Balington (ed.), (terj.), *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekadar Jumlah*, (Jakarta: IDEA, 2002), hlm 20-22.

¹² *Bergaining Power* yang dimaksud adalah kesempatan perempuan untuk melakukan daya tawar serta membuktikan kepada publik bahwa dirinya mampu tampil sebagai politisi yang berkiprah diparlemen. Kemampuan melakukan daya tawar itu akan berimplikasi pada upaya meningkatkan perannya di dunia politik. Penjelasan lebih lanjut lihat Arimbi, Indriaswati Dyah Saptaningrum dan Sri Sulstyani (ed.), *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*, (Yogyakarta: kanisius, 1998), hlm 122.

yang diharapkan karena persentase keterwakilan perempuan tidak lebih dari 20% sedangkan keterwakilan laki-laki di parlemen mencapai 80% lebih.¹³ Berdasarkan laporan Puskapol FISIP UI, persentase keterpilihan perempuan di DPR pada Pemilu 2014 sebesar 17,32% atau 97 orang. Bila dibandingkan dengan hasil Pemilu 2009, persentasenya menurun dari 103 caleg perempuan terpilih atau 18% dari total kursi DPR, sedangkan hasil pemilu 2004 adalah 11,3% atau 62 caleg perempuan terpilih.¹⁴ Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa pemilih yang memberikan suaranya pada caleg sebagian besar memilih caleg laki-laki yaitu 76,69 persen, sedangkan yang memberikan suara untuk caleg perempuan adalah 23,31 persen.¹⁵

Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih ketinggalan dibanding negara-negara lain dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen meskipun hampir semua negara persentase perempuan lebih rendah daripada persentase laki-laki. Di Swedia sekitar 43,6% perempuan duduk di parlemen, Denmark 39,2% dan Belanda 38,7%. Bahkan Afrika Selatan yang baru bangkit dari isu politik rasis keterwakilan perempuan bisa mencapai 40,8% di parlemen. Demikian juga bila dibandingkan dengan negara asia, Indonesia masih kalah dengan Singapura yaitu 25,3%, Vietnam 24,3%. Cina 23,4% dan lebih baik dari Republik Korea 15,7%, India 11,4%, Malaysia 10,4%, Jepang 8,1%, Thailand 6,1%, dan

¹³ Heriyani Agustina, "Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender" dalam Siti Hariti Sastriyani, *Op. Cit*, hlm 163

¹⁴ Lihat Kompas.Com, "Caleg Perempuan Terpilih DPR 2014 – 2019 Menurun" dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/14/2144526/Caleg.Perempuan.Terpilih.DPR.Periode.2014-2019.Menurun> [19/10/2014]

¹⁵ Diolah dari laporan Puskapol FISIP UI tentang hasil Pemilu 2014. Lihat puskapol.ui.ac.id

Myanmar 5,6%. Sedangkan yang paling tinggi keterwakilan perempuan di parlemen adalah Kuba yaitu 48,9%.¹⁶

Tabel 1.
Perbandingan Persentase Jumlah Anggota Parlemen Antarnegara

No.	Negara	Jumlah Anggota Parlemen	Perempuan	%
1.	Kuba	612	299	48,9
2.	Swedia	349	152	43,6
3.	Afrika Selatan	400	163	40,8
4.	Denmark	179	70	39,1
5.	Belanda	150	58	38,7
6.	Singapura	99	25	25,3
7.	Vietnam	498	121	24,3
8.	Cina	2987	699	23,4
9.	Indonesia	560	79	17,13
10.	Republik Korea	300	47	15,7
11.	India	543	62	11,4
12.	Malaysia	222	23	10,4
13.	Jepang	480	39	8,1
14.	Thailand	197	12	6,1
15.	Myanmar	429	24	5,6

Sumber: Olah data dari laporan *International Parliamentary Union (IPU)* per 1 Oktober 2014

Di Indonesia sendiri, kalau dirunut ke belakang sejak 13 periode DPR representasi perempuan belum sama sekali menembus 30% kursi di parlemen. Paling tinggi yakni pada pemilu 2009, keterwakilan perempuan di parlemen mencapai 18%, sedangkan pada pemilu 2014 justru menurun menjadi 17,32%. Pada pemilu 2009 dari 560 DPR 103 diantaranya adalah perempuan, tetapi menurun menjadi 79 wakil perempuan pada pemilu 2014. Hal ini jelas

¹⁶ Mufidah (ed.), *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2010), hlm 19 lihat juga “Women in Parliaments World Classification” dalam *International Parliamentary Union (IPU)*, <http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm>

memperhatikan, sejatinya pemilu 2014 diharapkan keterwakilan meningkat daripada pemilu-pemilu sebelumnya justru semakin menurun. Paling rendah keterwakilan perempuan di DPR bila dilihat dari hasil pemilu terjadi pada pemilu 1977, yakni 29 orang atau 5,9%. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.
Perbandingan Persentase Jumlah Anggota DPR Menurut Jenis Kelamin Hasil Pemilu 1955 – 2014

No.	Periode DPR	Jumlah DPR	Jenis Kelamin			
			Laki-Laki	%	Perempuan	%
1.	DPR 1950-1955*	245	236	96,3	9	3,7
2.	DPR 1955-1960	289	272	94,1	17	5,9
3.	DPR 1956-1959**	513	488	95,1	25	4,9
4.	DPR 1971-1977	496	460	92,7	36	7,3
5.	DPR 1977-1982	489	460	94,1	29	5,9
6.	DPR 1982-1987	499	460	92,2	39	7,8
7.	DPR 1987-1992	565	500	88,5	65	11,5
8.	DPR 1992-1997	562	500	89,0	62	11,0
9.	DPR 1997-1999	554	500	90,3	54	9,7
10.	DPR 1999-2004	546	500	91,6	46	8,4
11.	DPR 2004-2009	550	487	88,5	63	11,5
12.	DPR 2009-2014	560	457	82	103	18
13.	DPR 2014-2019	560	481	82,68	79	17,32

Catatan: *DPR Sementara, bukan hasil pemilu **Konstituante
Sumber: Olah data dari laporan Puskapol FISIP UI tentang hasil pemilu

Rendahnya keterwakilan perempuan tersebut juga terjadi di daerah salah satunya di Kabupaten Sumenep. Setidaknya, dalam catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Sumenep termasuk kabupaten paling miris dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen bersama Bangkalan, Bondowoso dan Tulungagung. Sedangkan untuk Kota/Kabupaten yang memenuhi keterwakilan perempuan di DPRD yakni, Kota Batu 32 persen,

Kota Madiun 33 persen dan Kota Probolinggo 30 persen.¹⁷ Dari 50 caleg terpilih sebagai anggota DPRD Sumenep 2014-2019, hanya tiga yang perempuan. Di antaranya adalah Dwita Andriani dari PAN dapil 1, Ummul Hasanah dari PDI Perjuangan dapil 2, dan Zulfah dari Partai Gerindra dapil 3. Perolehan suara ketiganya tercatat, Dwita Andriani memperoleh 4.040 suara, Ummul Hasanah 6.368 suara, dan Zulfah 3.981 suara. Secara keseluruhan, jumlah caleg perempuan yang bertarung untuk merebut kursi DPRD Sumenep melalui Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 202 orang yang tersebar di tujuh dapil.¹⁸

Hasil tersebut persis dengan hasil Pemilu 2009 dimana caleg perempuan yang lolos ke parlemen adalah tiga orang, yaitu Dwita Andriani dari PAN, Endang Sri Rahayu dari Partai Golkar dan Rachema dari PDP. Sementara itu, Pemilu 2004 tepat pertama kalinya UU kuota 30% diberlakukan menghasilkan dua caleg perempuan terpilih, yaitu Endang Sri Rahayu dari Partai Golkar dan Dewi Khalifah dari PKB.¹⁹ Bila dicermati sejak Pemilu 2004 hingga 2014, mayoritas caleg perempuan yang terpilih adalah muka-muka lama. Endang Sri Rahayu yang terpilih pada Pemilu 2004 terpilih kembali pada Pemilu 2009, begitu pula Dwita Andriani yang terpilih pada Pemilu 2009 ternyata terpilih lagi pada Pemilu 2014. Tetapi yang jelas, dari tiga pemilu langsung di atas, keterwakilan perempuan dalam parlemen Sumenep tercatat sangat minim. Ada peningkatan

¹⁷ Lihat DetikNews, "Peran Perempuan dalam Pemilu 2014 Diharapkan di atas 30 Persen" dalam <http://news.detik.com/surabaya/read/2013/11/25/122930/2422532/475/peran-perempuan-dalam-pemilu-2014-diharapkan-di-atas-30-persen?nd771104bcj> [19/10/2014]

¹⁸ Lihat ANTARANEWS Jatim, "Susahnya Cari Perempuan Raih Kursi DPRD Sumenep" dalam <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/133383/susahnya-cari-perempuan-raih-kursi-dprd-sumenep> [19/10/2014]

¹⁹ Olah data dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumenep.

memang ketimbang Pemilu 2004, tapi masih jauh dari tuntutan kuota minimal 30% di parlemen. Persentasenya rata-rata 4% sampai 6% dari total 50 kursi di DPRD Sumenep. Tentu saja kenyataan ini harus disadari bahwa ruang ekspresi perempuan untuk masuk masih jauh dari rasa keadilan dan kesetaraan.²⁰

Rendahnya keterwakilan perempuan di Sumenep tersebut tidak seimbang dengan jumlah perempuan yang jauh lebih tinggi daripada jumlah laki-laki. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, jumlah pemilih perempuan pada pemilu 2014 adalah 475.975 orang sedangkan jumlah pemilih laki-laki adalah 425.060, selisih 5000 lebih. Begitu juga jumlah perempuan yang menggunakan hak pilihnya jauh lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu perempuan 380.916 orang dan laki-laki 323.154 orang.²¹ Jumlah pemilih perempuan bila dilihat per dapil pun lebih tinggi daripada laki-laki. Perbandingannya tidak kurang perempuan 52% dan laki-laki 48%. Seharusnya dengan tingginya jumlah pemilih perempuan caleg perempuan secara struktural memiliki kesempatan lebih besar untuk lolos ke parlemen.

Catatan sejarah sesungguhnya juga menyebutkan bahwa selama rentang waktu kepemimpinan di Sumenep keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan sangat memperihatinkan, hanya sekali seorang perempuan memegang tampuk kepemimpinan. Itu pun terjadi saat zaman kerajaan, satu-satunya Ratu Sumenep adalah R. Ayu Rasmana Tirtoneoaro menggantikan Raja sebelumnya. Ia diangkat menjadi ratu karena sesepuh keraton ingin membalas

²⁰ Soetjipto Wirosardjono, *Dialog dengan Kekuasaan: Esai-esai tentang Agama, Negara dan Rakyat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm 263.

²¹ Diolah dari data Komsil Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep tentang data pemilih pada Pemilu 2014.

kepada suaminya—kala itu sudah meninggal—yang telah berhasil membunuh pemberontak dan kebetulan kursi kerajaan juga kosong. Kepemimpinannya pun tidak lama, karena setelah menikah lagi kekuasaan keraton langsung diambil alih oleh suaminya yang baru yakni Bindara Saud sampai tahun 1762. Pasca era kerajaan pun tepatnya tahun 1929 sampai sekarang belum sama sekali kepemimpinan Sumenep dipegang oleh perempuan.²² Fenomena sejarah ini cukup menggambarkan bahwa keterwakilan perempuan di Sumenep selama ini memang terlihat miris. Bukan hanya dalam pemerintahan seperti diuraikan di atas, sampai saat ini keterwakilan di parlemen juga sangat memperihatinkan. Perempuan belum banyak berperan besar dalam politik dan mengambil bagian dalam pembuatan kebijakan.

Rendahnya keterwakilan perempuan itu tentu tidak bisa dilepaskan dari banyak faktor, antara lain adalah lingkungan sosial masyarakat yang masih terikat oleh budaya patriarki, pemahaman tentang makna politik yang dianggap kotor dan keras,²³ lemahnya kaderisasi partai, kualitas individu, dan kurangnya *political will* pemerintah. Selain faktor-faktor tersebut, *positioning* politik perempuan adalah faktor yang juga penting dan dapat mempengaruhi tingkat elektabilitas perempuan di masyarakat. Paling tidak, apabila strategi *positioning* politik dilakukan secara maksimal tentu akan berdampak pada meningkatnya keterpilihan perempuan di parlemen. Begitupun sebaliknya, kurang maksimalnya *positioning* politik dapat berpengaruh juga pada keterpilihan perempuan oleh masyarakat.

²² [DIKBUPARPORA] Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, *Sejarah Sumenep*, Sumenep: Dikbudparpora, 2012), hlm 37 – 51 dan 115 atau bisa dilihat di sumenepkab.go.id tentang sejarah raja-raja dan bupati Sumenep.

²³ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm 16 – 18.

Faktor *positioning* memang bukanlah satu-satunya cara yang amat berpengaruh untuk meningkatkan keterpilihan perempuan, tetapi langkah tersebut berperan urgen dan juga menentukan. Menurut Syafiq Hasyim, partisipasi politik perempuan menuju parlemen harus didukung oleh strategi kampanye terutama untuk mengaktualisasikan kualitas individu kepada publik pemilih. Strategi yang benar-benar dilakukan dengan tepat sasaran dapat mempengaruhi pilhan politik pemilih, mereka akan memilih kandidat yang dikenal dan banyak direkam *track record*-nya.²⁴ Maka dari itu, ketika *positioning* politik dilakukan dengan tepat sasaran sebagai strategi kemenangan bukan tidak mungkin perempuan bisa mendapatkan suara pemilih.

Positioning politik menurut Worcester dan Baines (2006) sebagaimana dikutip oleh Firmansyah adalah semua aktifitas untuk menanamkan kesan di benak masyarakat dalam hal ini pemilih agar mereka bisa membedakan partai atau kandidat bersangkutan.²⁵ Ketika *image* seorang kandidat direkam secara berulang-ulang oleh masyarakat, maka elektabilitas kandidat bersangkutan semakin kuat. Hal-hal seperti kredibilitas dan reputasi bisa dijadikan sebagai media untuk melakukan *positioning* politik. Kandidat juga bisa menyampaikan pesan politik ke masyarakat berupa visi-misi, program kerja, janji dan sebagainya. Intinya, dalam *positioning* politik semua pesan politik yang disampaikan ke pemilih dimaksudkan agar kandidat tertentu menjadi referensi utama dalam benak masyarakat saat dihadapkan pada pemilihan. Tidak bisa dimungkiri bahwa salah

²⁴ Syafiq Hasyim, *Perempuan dalam Fiqih Politik*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm 124.

²⁵ Firmansyah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia: 2011), hlm 218.

satu acuan pemilih saat pemilu dapat dipengaruhi oleh posisi dan citra kandidat di mata pemilih.

Caleg perempuan sudah semestinya melakukan *positioning* agar masyarakat dengan mudah menentukan pilihan kepada caleg bersangkutan. Apalagi lawan politik caleg perempuan bukan hanya sesama perempuan tetapi juga laki-laki, karenanya signifikansi *positioning* politik dibutuhkan sekali agar caleg perempuan mampu merebut citra di masyarakat dari para lawan-lawan politiknya. Urgensi tersebut tentu juga didorong oleh posisi perempuan secara sosial selama ini. Kita bisa lihat peran perempuan di masyarakat, “klaim” perempuan subordinat masih tertanam kuat. Bahkan stereotip terhadap perempuan yang berkembang selama ini menuntut perempuan melakukan segala strategi guna menunjukkan dirinya betul-betul pantas duduk di jabatan publik seperti politik/parlemen.

Kaitannya dengan *positioning* politik dan posisi perempuan itu, fenomena keterwakilan perempuan dalam parlemen di Sumenep menjadi menarik untuk diteliti lebih jauh mengingat penelitian tentang strategi politik perempuan belum begitu banyak disentuh selama ini. Di sisi lain, Sumenep menjadi salah satu kabupaten paling miris dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa keterwakilan caleg perempuan pada Pemilu 2014 yaitu hanya tiga orang dari total caleg perempuan sebanyak 202 orang. Jumlah yang sangat jauh dari target keterwakilan 30% di parlemen. Oleh karena itu, menggali temuan-temuan mengenai strategi *positioning* politik caleg perempuan kiranya amat urgen, selain untuk mengkaji kekuatan strategi

positioning politik itu sendiri termasuk juga untuk menelusuri konteks keterpilihan caleg perempuan tersebut, lebih karena kapasitas personal, pengaruh partai ataukah justru terdapat faktor lain seperti keturunan/dinasti. Yang tak kalah penting tentunya adalah untuk mengurai problem posisi perempuan di masyarakat. Atas dasar pertimbangan itulah dalam penelitian ini penulis mengambil judul penelitian ***Positioning Politik Caleg Perempuan pada Pemilu Legislatif 2014 di Sumenep.***

B. Rumusan Masalah

Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Sumenep tentu sangat memperhatikan karena sesungguhnya yang diharapkan adalah wakil perempuan di parlemen semakin banyak. Meningkatnya keterwakilan perempuan tidak hanya dapat menyejajarkan diri dengan laki-laki, tetapi kehadirannya juga berguna bagi perjuangan kepentingan perempuan. Perempuan sudah semestinya terlibat langsung dalam pengambilan keputusan di parlemen. Rendahnya representasi perempuan di atas merupakan implikasi dari faktor yang kompleks, bisa jadi perempuan kalah saing atau kalah strategi. Maka dari itu rumusan penelitian ini adalah bagaimana *positioning* politik caleg perempuan pada Pemilu Legislatif 2014 di Sumenep?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *positioning* politik caleg perempuan pada Pemilu Legislatif 2014 di Sumenep.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang fokus kajiannya pada analisis perempuan dan gender, keterwakilan perempuan di parlemen atau penelitian yang berkaitan dengan *positioning* politik perempuan di Sumenep.
 - b. Memberikan kontribusi pengetahuan sosial khususnya tentang gender dan politik
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan kontribusi kepada perempuan, politisi, pemerintah dan para aktifis perempuan tentang korelasi *positioning* politik caleg perempuan dengan tingkat keterpilihannya di parlemen.
 - b. Memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang *positioning* politik perempuan pada saat pemilu.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan landasan bagi penelitian yang dilakukan. Penelitian ini berdasar pada hasil penelitian – penelitian sebelumnya yang relevan. Tujuannya, menurut Cooper (1984) sebagaimana dikutip oleh Creswell, selain untuk memberikan komparasi terkait penelitian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya, juga untuk menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian

lain yang berkaitan dengan topik penelitian dan sebagai parameter pentingnya penelitian dengan topik tersebut.²⁶ Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat peneliti:

Pertama, disertasi Doktor Bidang Hukum RR. Cahyowati. Universitas Brawijaya Tahun 2011 yang berjudul “Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Ditinjau dari Prinsip Keadilan, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi)”.²⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah keterwakilan perempuan di DPR RI sesuai dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi serta untuk menemukan alternatif pemecahan dalam menata keterwakilan perempuan di masa yang akan datang agar tuntutan kuota minimal 30% dapat diwujudkan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI belum memenuhi prinsip keadilan, HAM dan demokrasi karena dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang memuat kuota minimal 30% belum menyertakan pasal mengenai sanksi bagi partai yang tidak memenuhi kuota tersebut. Kebijakan dalam pencalonan dan penempatan perempuan dalam daftar calon juga belum seperti yang diharapkan. Alternatif pemecahannya adalah penguatan *affirmative action* dalam UU partai politik dan pemilu dengan lebih memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% serta penempatan perempuan dalam daftar calon dengan menggunakan sistem *zipper* tidak bolong,

²⁶ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (terj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 40.

²⁷ RR Cahyowati, *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Ditinjau dari Prinsip Keadilan, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi* [desertasi], (Malang: Universitas Brawijaya, 2011).

yaitu secara silang. Kebijakan afirmatif dalam UU dari pencalonan dan penempatan harus memberikan peluang perempuan untuk terpilih.

Kedua, Tesis Nofi Sri Utami Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2014. Tesis ini berjudul “*Women’s Law Politics Representativeness in Legislative Institutions Statutory Basis of the Republic of Indonesia of 1945 Era Reforms*”.²⁸ Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengkaji sistem hukum atau perundang-undangan mengenai representasi perempuan di lembaga legislatif dalam era reformasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa produk hukum yang ada selama era reformasi sudah cukup memberikan peluang bagi perempuan untuk duduk di legislatif, meskipun perkembangannya dari waktu ke waktu tidak sama. Perkembangan aturan hukum yang mengakomodasi pentingnya representasi perempuan tersebut adalah sebagai berikut: mulai dari UU Nomer 2/1999, UU Nomor 31/2002, UU Nomor 2/2008 dan UU Nomor 2/2011 Tentang Partai Politik yang mengatur keterwakilan perempuan minimal 30%. Demikian pula UU Nomor 3/1999, UU Nomor 13/2003, UU Nomor 2/2008 dan UU Nomor 8/2012 Tetang Pemilu yang juga sudah mencantumkan 30% keterwakilan perempuan. Persoalannya, sampai sekarang kuota tersebut belum terpenuhi secara maksimal disebabkan oleh beberapa faktor: belum ada sanksi bagi partai yang tidak memenuhi kuota, mayoritas laki-laki masih menganggap rendah kemampuan perempuan, partai masih menempatkan perempuan di nomor urut 3 dan partai menganggap kuota 30% hanya sekedar prasyarat lolos pemilu.

²⁸ Nofi Sri Utami, *Women’s Law Politics Representativeness in Legislative Institutions Statutory Basis of the Republic of Indonesia of 1945 Era Reforms* [tesis], (Malang: Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012)

Ketiga, Skripsi Abd. Rohim Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013. Skripsi ini berjudul “Problematika Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2004-2009”.²⁹ Penelitian ini memfokuskan pada masalah bagaimana problematika serta faktor apa saja yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta periode 2004-2009. Penelitian ini ditujukan kepada perempuan-perempuan yang menjadi DPRD Kota Yogyakarta.

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa keterwakilan perempuan dalam DPRD Kota Yogyakarta periode 2004-2009 masih banyak mengalami problem dan belum sepenuhnya memenuhi tuntutan UU mengenai 30% keterwakilan perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kuatnya budaya patriarki di masyarakat, anggapan perempuan bahwa politik sifatnya negatif dan ada anggapan bahwa aspirasi perempuan dapat diwakili oleh laki-laki. Faktor lain adalah cara partai yang tidak menerapkan secara maksimal ketentuan minimal 30% keterwakilan perempuan serta sistem pemilu yang juga menghambat kiprah politik perempuan, yaitu Pemilu 2004 dengan sistem nomor urut sementara Pemilu 2009 dengan sistem suara terbanyak. Alhasil, banyak perempuan terhambat untuk berkiprah dan memperjuangkan kepentingannya secara langsung di DPRD Kota Yogyakarta.

Keempat, penelitian Karis Rosida Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarnegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Malang 2010 berjudul “Strategi Calon Legislatif Perempuan pada Pemilihan Umum Anggota

²⁹ Abd. Rohim, *Problematika Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2004-2009* [skripsi], (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 di Kota Malang”.³⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh caleg perempuan guna memenangkan persaingan dan lolos menjadi anggota DPRD Kota Malang pada Pemilu 2009, yang difokuskan pada lima partai yaitu Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PKS, Partai Gerindra, dan Partai Golkar.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa strategi yang digunakan caleg perempuan pada pemilu DPRD Kota Malang Tahun 2009 sangat beragam, yaitu strategi pencitraan baik citra partai maupun citra dirinya, membangun kontrak politik, memberi sumbangan kepada pemilih, mengadakan pertemuan di masyarakat, kampanye gender dan sosialisasi cara pencoblosan. Dalam kaitannya dengan *marketing* politik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa caleg perempuan sudah menggunakan pendekatan *segmenting*, *targeting* dan *positioning*. Namun, bentuk pelaksanaannya masih kental dengan pendekatan konvensional dan kurang efektif. Partai dan tim sukses ternyata juga tidak berpengaruh banyak pada kemenangan caleg perempuan, melainkan citra dari masing-masing caleg itu sendiri.

Kelima, penelitian Kurniawati M. Harfin berjudul “Pengaruh *Personal Branding* dan *Positioning* terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilukada di Kabupaten Bonebolango” tahun 2012.³¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh *personal branding* dan *positioning* terhadap perilaku

³⁰ Karis Rosida, “Strategi Calon Legislatif Perempuan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009” dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 1, No. 1, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2010).

³¹ Kurniawati M. Harfin, “Pengaruh *Personal Branding* dan *Positioning* terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilukada di Kabupaten Bonebolango” dalam *Jurnal Politika* Vol. 3, No. 1 April, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), hlm 15-32.

pemilih pada pemilu pada Bonebolango 2010. Dari hasil penelitian ini disebutkan, pengaruh *personal branding* terhadap perilaku pemilih 50,41%, sedangkan *positioning* memberikan pengaruh 14,51% terhadap perilaku pemilih. Dari masing-masing variable bebas tersebut diperoleh hasil bahwa *personal branding* dan *positioning* terdapat korelasi positif terhadap perilaku pemilih sebesar 0.707. Namun, secara matematis korelasi tersebut masih belum terlalu tinggi. Konklusinya, *marketing* politik melalui *personal branding* dan *positioning* politik belum begitu berpengaruh banyak terhadap perilaku pemilu pada pemilu pada Bonebolango tahun 2010.

Keenam, penelitian Mari Rosieana Mahasiswa Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda tahun 2013 yang berjudul “Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Malinau; Studi pada Anggota DPRD Kabupaten Malinau³²”. Penelitian membahas tentang keterwakilan perempuan serta peran dan kinerjanya sebagai anggota DPRD perempuan di Kabupaten Malinau periode 2009-2014.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa keterwakilan perempuan dalam DPRD Malinau hanya tiga orang dari total 20 anggota. Namun, meskipun jumlahnya sedikit, secara fungsional mereka menduduki jabatan-jabatan strategis yaitu ketua komisi, sekretaris fraksi, sekretaris II Badan Anggaran dan Badan Musyawarah. Di internal DPRD Malinau pun tidak ada bias gender karena semua anggota yakin setiap orang baik laki-laki maupun perempuan punya kompetensi masing-masing. Peran dan kinerja DPRD perempuan telah memberikan kontribusi

³² Mari Rosiena, “Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Malinau; Studi pada Anggota DPRD Kabupaten Malinau” dalam *eJournal Pemerintahan Integratif*, Vol. 1 No. 1, ejournal.pin.or.id, (Samarinda: Fisip Universitas Mulawarman, 2013), hlm 1-12.

bagi kepentingan perempuan dengan cara menguatkan kesetaraan gender dalam kebijakan anggaran dan peraturan daerah. Dengan demikian, kendati kuantitasnya belum mencapai kuota 30% seperti diamanatkan UU tetapi kualitas anggota DPRD perempuan Malinau telah banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan.

Peneliti dapat menyimpulkan dari beberapa tinjauan pustaka di atas bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Perbandingan tersebut terdapat pada fokus dan sudut pandang penelitian, teori dan metode penelitian. Hampir semua penelitian di atas menyangkut keterwakilan perempuan di parlemen, begitu pun dalam penelitian ini juga mengangkat topik keterwakilan perempuan di parlemen Kabupaten Sumenep. Penelitian RR. Cahyowati dan Nori Sri Utami banyak mengkaji aturan hukum dan sistem perundang-undangan yang terkait dengan keterwakilan perempuan, Abd. Rohim meneliti problematika dan faktor yang menghambat keterwakilan perempuan, Karis Rosida meneliti tentang strategi pemenangan caleg perempuan pada pemilu, Kurniawati M. Harfin mencoba mencari korelasi antara *personal branding* dan *positioning* politik terhadap perilaku pemilih, kemudian Mari Rosieana meneliti peran anggota parlemen perempuan. Sedangkan penelitian ini mengarah pada fokus penelitian yang lebih khusus, yaitu tentang *positioning* politik caleg perempuan pada pemilu 2014 di Sumenep. Fokus kajiannya untuk mengetahui *positioning* politik tiga caleg terpilih, tapi juga dibandingkan dengan caleg yang tidak terpilih dan caleg periode sebelumnya.

Penelitian ini tidak dapat dimungkiri memang hampir sama dengan apa yang diteliti oleh Karis Rosida di atas, yaitu sama-sama mengarah pada strategi kampanye. Tetapi secara khusus penelitian ini mengarah pada strategi *positioning* politik saja sehingga kajiannya lebih banyak menjelaskan tentang beberapa aspek dari *positioning* itu sendiri yaitu analisis isu, analisis lawan politik dan pesan politik. Hasil penelitian ini juga menggambarkan temuan-temuan yang hampir sama terutama terkait implementasi *positioning* politik yang dilakukan oleh caleg perempuan di Sumenep, seperti *blusukan*, silaturahmi dan kegiatan sosial. Namun, menyangkut sumber kampanye Karis Rosida tidak menjelaskannya secara komprehensif, melainkan lebih kepada langkah-langkah konkrit kampanye seperti disebutkan di atas. Sementara hasil penelitian ini juga membahas tentang sumber dan modal *positioning* politik yang digunakan oleh caleg perempuan di Sumenep, sehingga dapat dipahami apa saja yang menjadi dorongan implementasi *positioning* itu dilakukan. Hasil penelitian ini juga tidak lupa membahas tentang segmentasi pilihan partai, hal ini selain karena *segmenting* dan *positioning* tidak dapat dipisahkan tapi juga untuk mendapatkan kajian komprehensif tentang strategi kampanye.

E. Landasan Teori

Penyusunan kerangka teoritis sangat penting untuk memperjelas jalannya penelitian yang dilakukan. Kerangka teoritis dapat dijadikan pisau analisis untuk memecahkan masalah yang dikemukakan dalam penelitian. Melalui kerangka teoritis jalannya penelitian secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan

terarah. Selain sebagai pedoman analisis, keberadaan teori juga membantu pembentukan kerangka pemikiran terhadap penelitian.³³ Penelitian ini menggunakan teori *positioning* politik dan teori gender sebagai acuan untuk menganalisis permasalahan penelitian, yaitu representasi perempuan dalam parlemen di Sumenep pada Pemilu 2014.

1. Teori *Positioning* Politik

Positioning adalah bagian dari strategi, dimana dalam dunia persaingan dimaksudkan untuk meraih kemenangan. Sebagai strategi dalam persaingan, *positioning* menjadi sangat penting keberadaanya. Hal ini bukan semata untuk menunjukkan posisi, tetapi lebih dari itu untuk menanamkan *brand* ke benak masyarakat yang menjadi sasaran. Selain sebagai strategi, *positioning* sesungguhnya merupakan bagian dari ilmu *marketing* yang sebelumnya sangat populer di dunia bisnis, yaitu semua aktifitas yang dimaksudkan untuk menanamkan kesan kepada para konsumen agar mereka dapat membedakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain.³⁴ Dalam *positioning*, suatu produk akan direkam oleh konsumen dalam bentuk kesan atau *image* sehingga mereka pun dapat dengan mudah mengidentifikasinya. Semakin tinggi kesan produk yang direkam, maka semakin mudah pula mengingat produk tersebut. Tentu saja menanamkan kesan ke konsumen tidak terbatas pada produk saja, bisa berupa

³³ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 40.

³⁴ Firmansyah, *Op. Cit.*, hlm 164 – 177.

kredibilitas dan reputasi seperti pelayanan, kepuasan konsumen dan sebagainya.

Konsep ini kemudian diadopsi dalam dunia politik. Pengertiannya pun sesungguhnya tidak terlalu jauh berbeda, yaitu dari persaingan ekonomi menjadi persaingan politik. Dalam persaingan politik juga diperlukan strategi *positioning*. Partai atau kandidat harus mampu menanamkan kesan dan *image* politik kepada masyarakat. Tujuannya, agar partai atau kandidat bersangkutan mudah diingat dan menjadi pilihan masyarakat. Untuk dapat tertanam, tentu saja *image* tersebut harus memiliki sesuatu yang berbeda, unik dan menarik daripada partai atau kandidat lainnya. *Image* suatu kandidat harus memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan kandidat-kandidat lain.

Perempuan sebagai caleg seyogyanya memiliki sesuatu yang berbeda daripada caleg-caleg lain, entah itu caleg laki-laki ataupun perempuan. Keragaman pilihan tentu akan menyulitkan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Apalagi bila semua caleg memiliki karakteristik yang sama dan tidak ada yang menampilkan sesuatu yang berbeda jelas akan membuat masyarakat semakin sulit menentukan siapa yang harus dipilih. Memilih satu kandidat tidak akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dibandingkan ketika masyarakat memilih kandidat lain jika semua kandidat punya karakteristik yang sama. Karena itu, keberadaan *positioning* politik sangat berguna sebagai pembeda antara

satu caleg dengan caleg lain, sehingga akan timbul kesan khusus yang tertanam dalam benak masyarakat.

Menurut Worcester dan Baines (2006) sebagaimana dikutip oleh Firmanzah, semua aktifitas politik adalah aktifitas untuk memposisikan diri dan mereposisikan diri, dengan semua aktifitas itu untuk mendefinisikan identitas suatu partai atau kandidat.³⁵ Ketepatan membuat *positioning* dalam hal yang menyangkut *image* politik, produk politik, pesan politik dan program kerja akan membantu pula dalam penciptaan identitas politik. Artinya, selain sebagai media untuk diferensiasi, *positioning* politik juga membantu dalam mendefinisikan identitas. Iklim persaingan politik seperti pemilu menuntut adanya reposisi identitas ini agar identitas kandidat dapat dipersepsikan dengan berbeda oleh masyarakat. Masyarakat akan membandingkan identitas satu kandidat dengan kandidat lain. Caleg perempuan dalam pemilu seyogyanya harus mampu melakukan proses ini agar terwujud *track record* yang kuat di benak pemilih. *Positioning image* politik bisa berupa program kerja, isu politik atau *image* kepemimpinan.

Masing-masing kandidat berusaha menjadi yang dominan dan menguasai benak masyarakat dalam pemilu. Dalam benak pemilih, semua aktifitas yang dilakukan oleh kandidat akan direkam. Baik buruknya kinerja kandidat diukur dari perspektif pemilih. Posisi yang kuat dalam benak masyarakat membuat suatu kandidat selalu diingat dan menjadi

³⁵ *Ibid.*, hlm 219.

referensi bagi masyarakat ketika mereka dihadapkan pada serangkaian pilihan. Menjadi referensi berarti kandidat tersebut menjadi yang pertama kali muncul dalam benak masyarakat. Karena itu, pemilu sebetulnya pertarungan *positioning* antar partai ataupun antar kandidat.

Positioning politik secara tidak langsung dapat menjadi parameter keterpilihan kandidat. Sama halnya dalam dunia bisnis, posisi produk menjadi menjadi tolok ukur ketertarikan konsumen pada produk tersebut. Dalam persaingan politik, yang menang adalah pihak yang mendapatkan dukungan terbesar. Dengan demikian, mengejar kemenangan berarti kandidat harus mampu melakukan *positioning* dalam benak masyarakat luas. Rendahnya keterpilihan perempuan di Sumenep pada pemilu yang lalu dimana hanya tiga caleg perempuan terpilih penting untuk dilihat dari perspektif *positioning* ini. Seberapa jauh relevansi kandidat perempuan menempatkan kesan dirinya ke masyarakat dengan tingkat keterpilihan mereka. Mereka tidak hanya bersaing dengan sesama perempuan, tetapi juga dengan kandidat laki laki tentu kekuatan strategi *positioning* amat penting. Mereka dituntut memunculkan sesuatu yang beda daripada caleg perempuan maupun caleg laki-laki yang lain, yaitu keunggulan-keunggulan dan menanamkannya dalam benak masyarakat.

Itulah pentingnya strategi *positioning* politik dalam persaingan politik seperti pemilu, yaitu (1) *positioning* politik akan membantu masyarakat dalam menentukan siapa yang akan dipilih. Kejelasan posisi kandidat akan memudahkan pemilih membedakan satu kandidat dengan

kandidat-kandidat lain, (2) *positioning* politik yang jelas membantu kandidat sendiri membentuk identitas mereka, (3) membantu penyusunan strategi *approach* ke masyarakat, dan (4) membantu dalam mengarahkan jenis sumber daya politik apa yang dibutuhkan.³⁶ Woncester dan Baines (2006) sebagaimana dikutip oleh Firmanzah juga menjelaskan signifikansi *positioning* ini:

Partai politik dan kandidat pemilihan umum secara permanen melakukan *positioning* melalui penciptaan dan penciptaan ulang, *image* serta jasa yang disediakan bagi publik. *Positioning* ini penting agar tidak tergusur oleh para pesaing yang melakukan hal serupa. Untuk membantu pemilih dalam membedakan suatu kandidat dengan para pesaingnya, *positioning* mutlak dilakukan.³⁷

Tahap-tahap *positioning*, sebagaimana disebutkan di atas adalah riset pasar dan isu politik, riset lawan, penyusunan pesan politik dan yang terakhir penyampaian pesan politik kepada pemilih. Dalam riset pasar dan isu politik penting diperhatikan adalah segmentasi pemilih. Segmentasi dan *positioning* politik merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Segmentasi diperlukan untuk mengidentifikasi karakteristik yang muncul di setiap kelompok masyarakat.³⁸ Sedangkan *positioning* diperlukan sebagai strategi untuk membangun citra guna mendapatkan segmen terbesar. Kendati demikian, strategi *positioning* politik lebih banyak

³⁶ *Ibid.*, hlm 217.

³⁷ *Ibid.*, 226.

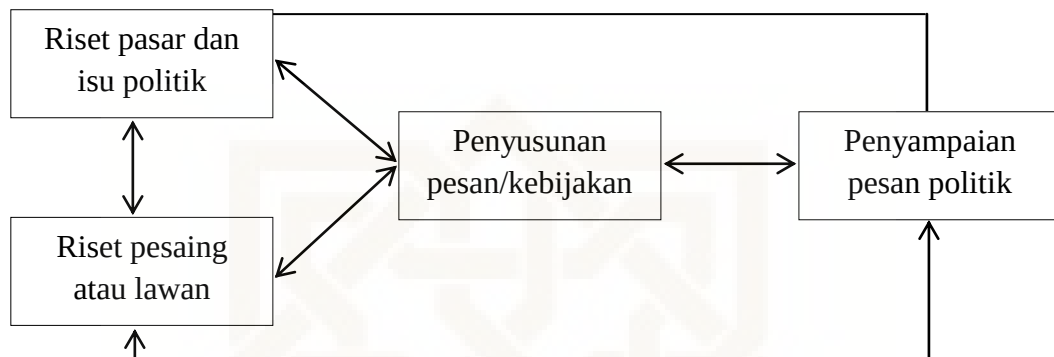
³⁸ Dalam konteks ini, kandidat yang melakukan *positioning* politik harus memperhitungkan kelompok-kelompok masyarakat yang hendak dimasuki. Sebagai contoh, penggunaan musik dangdut dalam kampanye mungkin efektif bagi masyarakat pinggiran, tapi kurang efektif bila kelompok masyarakat yang dituju adalah para guru atau dosen meski tidak sedikit guru atau dosen yang suka dangdut. Diterima atau tidaknya *positioning* tentu juga sangat bergantung ketepatan segmentasi pemilih, yaitu ketepatan pendekatan kepada masing-masing karakteristik kelompok masyarakat.

digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini mengingat penelitian ini fokus pada proses *positioning* politik caleg perempuan. Namun, analisis *segmenting* tetap digunakan terutama pada analisis pilihan partai dan daerah pemilihan. Riset isu yang berkembang di masyarakat juga penting agar *positioning* yang dilakukan efektif dan tepat sasaran. Posisi tawar yang dilakukan kandidat mesti memperhatikan isu strategis yang berkembang dan diminati masyarakat. *Positioning* politik yang tidak tepat hanya akan sia-sia saja karena *out of box* dari kepentingan pemilih.

Positioning politik juga tidak dapat efektif tanpa adanya analisis pesaing. Keragaman kandidat menyulitkan masyarakat menentukan pilihan, karena itu analisis pesaing diperlukan untuk mengidentifikasi pesaing atau lawan politik sehingga kandidat dapat memposisikan dirinya berbeda dari pesaingnya. Hal tersebut tidak hanya berguna untuk mengetahui identitas pesaing, tetapi juga sebagai strategi untuk memunculkan keunggulan yang tidak dimiliki pesaing. Berkaitan dengan kandidat perempuan, maka analisis pesaing selain sesama perempuan tentu saja juga dengan laki-laki. Kandidat perempuan perlu menemukan kekuatan yang dimiliki pesaingnya (caleg perempuan ataupun laki-laki) agar kemudian bisa mencari celah dan mengaktualisasikan kelebihan-kelebihannya kepada pemilih yang tidak dimiliki oleh pesaingnya tersebut. Hasil analisis pemilih, isu dan pesaing kemudian dijadikan acuan

penyusunan pesan politik. Pesan politik disini bisa berupa visi-misi, janji politik, program kerja, atau jargon politik.³⁹

Skema 1.
Model Positioning Politik Woncester dan Baines



Sumber: Woncester dan Baines (2006) dalam Firmasyah, *Mengelola Partai Politik...* (2011)

2. Teori Gender

Istilah gender diketengahkan oleh para ilmuwan sosial sesungguhnya untuk menjelaskan mana perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrati dan mana yang bersifat konstruksi sosial-budaya. Gender berarti sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Konsep gender ini berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin hanya melihat laki-laki dan perempuan berdasarkan fungsi biologis. Perbedaan jenis kelamin merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan, sehingga sifatnya permanen dan universal. Gender dibentuk oleh faktor-faktor sosial dan budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial laki-laki dan perempuan

³⁹ Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (terj.), (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm 253 – 254,

yang sifatnya tidak permanen.⁴⁰ Gender menunjukkan konsep sosial yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan.

Menurut teori gender, peran laki-laki dan perempuan secara sosial bukanlah sesuatu yang *given* dan kodrati, melainkan kedua jenis kelamin ini dikonstruksikan oleh masyarakat. Anggapan bahwa laki-laki dikatakan kuat, *macho*, tegas, rasional dan seterusnya sesungguhnya merupakan rekayasa masyarakat patriarki. Demikian juga sebaliknya, anggapan bahwa perempuan lemah, emosional dan seterusnya sesungguhnya juga hanya diskenario oleh kultur patriarki. Beberapa konstruksi sosial seperti perempuan tugasnya berada pada wilayah domestik dan laki-laki bekerja di luar rumah terjadi karena adanya konstruk dari masyarakat sehingga wacana itu pun menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Laki-laki dicitrakan sebagai diri yang kuat sehingga layak untuk berada di luar, sedangkan perempuan dicitrakan sebagai pribadi yang hanya mampu berada di dapur, kamar dan sumur. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Shields sebagaimana dikutip oleh Mufidah, *it is public acceptance of the belief that "women are emotional, men are rational", the issue has not been studied empirically by contemporary feminist psychologist. It is just recognized as natural law, scientifically it remains untested.*⁴¹

Menurut Chafetz sebagaimana dikutip oleh Ritzer, perbedaan peran laki-laki dan perempuan secara sosial tersebut bisa mengakibatkan

⁴⁰ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 410.

⁴¹ Mufidah Ch., *Bingkai Sosial Gender; Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm 3.

kerugian pada salah satu pihak terutama perempuan. Sebab, perempuan ditempatkan tidak setara dengan peran yang dimiliki laki-laki, perempuan pada posisi subordinat⁴². Perbedaan peran tersebut bukanlah *equilibrium* sebagai bentuk keseimbangan kerja. Perbedaan itu merupakan bentuk dominasi karena “sengaja” diciptakan oleh proses sosial dan budaya (patriarki). Sebagai contoh, perempuan cukup di rumah saja dengan melakukan pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, merawat anak dan mengurus rumah tangga. Padahal perempuan juga membutuhkan aktualisasi diri sebagai manusia pada umumnya.

Konsekuensinya, menurut teori gender, relasi laki-laki dan perempuan merupakan relasi dominasi. Posisi superior yang dimiliki laki-laki, yakni rasional, maskulin dan petualang publik dianggap merupakan sifat yang melekat pada identitas tersebut. Kualitas rasionalitas dan maskulinitas laki-laki, diyakini lebih unggul dari kualitas emosionalitas dan feminitas perempuan. Konsekuensi dari keyakinan ini adalah lahirnya klaim masyarakat patriarki bahwa wajar laki-laki memiliki posisi superior, dominatif dan menikmati posisi-posisi istimewa dan sejumlah *privilege* lainnya atas perempuan.

Kehadiran analisis gender sesungguhnya dapat digunakan untuk memahami realitas relasi dominasi laki-laki dan perempuan tersebut. Analisis gender hendak mengungkap perbedaan gender yang telah melahirkan perbedaan peran, fungsi dan bahkan ruang beraktivitas

⁴² *Ibid.*, hlm 411.

antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Sedemikian rupa perbedaan gender itu melekat pada cara pandang masyarakat, sehingga masyarakat menganggapnya tradisi dan seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen.⁴³ Dalam masyarakat tradisional utamanya paradigma ketidaksejajaran gender itu masih sangat mengakar, seiring dengan kuatnya tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat.

Pembedaan peran tersebut bisa mengakibatkan terjadinya diskriminasi gender. Pembagian peran yang ketat seperti peran, tugas, fungsi dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan bisa menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan. Perempuan adalah pihak paling dirugikan dari diskriminasi ini. Beberapa bentuk diskriminasi gender yang bisa terjadi adalah⁴⁴ :

1. Marginalisasi (peminggiran) terhadap peran-peran perempuan, bahwa perempuan tugasnya dalam wilayah domestik saja seperti mengurus rumah tangga dan laki-laki di wilayah publik. Konsekuensinya adalah pembatasan peran perempuan dalam ruang-ruang publik.
2. Subordinasi, yaitu kondisi dimana salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Dalam masyarakat patriarki, ada anggapan yang menempatkan kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

⁴³ Muhidin M. Dahlan (Ed.), *Postkolonialisme; Sikap Kita terhadap Imperialisme*, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2001) hlm 152.

⁴⁴ Mufidah Ch., *Op. Cit.*, hlm 8 – 10.

3. *Stereotype* merupakan pelabelan atau penandaan yang secara umum selalu melahirkan ketidakadilan pada salah satu jenis kelamin tertentu utamanya perempuan.
4. Kekerasan, artinya suatu serangan fisik maupun serangan non fisik yang dialami perempuan maupun laki-laki sehingga yang mengalami akan terusik batinnya.
5. Beban kerja, yaitu suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender dimana beberapa beban kegiatan diemban lebih banyak oleh salah satu jenis kelamin.

Relasi ketimpangan gender tersebut juga bisa menyebabkan domestifikasi perempuan dan pembatasan dalam peran publik.⁴⁵ Patriarki tersebut dapat dilihat dalam politik dan pemerintahan misalnya, dimana laki-laki memiliki posisi lebih tinggi daripada perempuan. Ada asumsi bahwa laki-laki dianggap mampu melindungi dan diandalkan untuk memimpin. Potensi kepemimpinan ini bukan berarti tidak dimiliki oleh perempuan, tetapi disebabkan oleh konstruksi kultur yang ada bahwa perempuan dianggap tidak layak memimpin. Oleh karena itu, kecenderungan minimnya perempuan dalam politik bisa dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki yang berkembang di masyarakat.

Penulis menjadikan teori *positioning* politik dan teori gender sebagaimana dijelaskan di atas sebagai acuan untuk menganalisis data-data yang didapat, yaitu tentang keterwakilan perempuan dalam parlemen

⁴⁵ Haideh Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam* (terj.), (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm 172.

Sumenep pada Pemilu 2014. Penulis mendeskripsikan bagaimana sebetulnya *positioning* politik caleg perempuan pada Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014 lalu, mulai dari analisis isu, analisis pesaing, bentuk-bentuknya dan masalah-masalahnya. Lebih jauh, penulis menggunakan teori ini untuk mengupas bagaimana relevansi strategi *positioning* politik dengan keterpilihan caleg perempuan. Sedangkan teori gender, penulis menggunakannya sebagai analisis konteks politik perempuan, bagaimana pengaruh budaya patriarki terhadap *positioning* politik caleg perempuan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa fokus penelitian adalah *positioning* politik tiga caleg terpilih, meski dalam pembahasannya juga memasukkan data-data dari caleg yang tidak terpilih sebagai perbandingan. Komparasi ini dimaksudkan untuk menemukan perbedaan dan persamaan *positioning* antarcaleg tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian untuk mengkaji data baik berupa kata-kata ataupun lisan dari obyek yang diamati.⁴⁶ Menurut Creswell, penelitian jenis kualitatif bertujuan untuk menggali makna dari masalah-masalah sosial dan kemanusiaan.⁴⁷ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu peneliti melukiskan fakta dan data yang

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm 7.

⁴⁷ John W. Creswell, *Op. Cit.*, hlm 4.

didapat dari penelitian sebagaimana adanya⁴⁸ kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan *positioning* politik caleg perempuan di Sumenep sebagaimana fakta yang didapat kemudian dianalisis menggunakan teori *positioning* politik.

2. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Sumenep Madura. Pertimbangan faktor lokalitas penulis sebagai warga Sumenep menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian, selain kondisi rendahnya keterwakilan perempuan di Sumenep tentunya. Kaitan lokalitas penulis dengan lokasi penelitian ini diyakini dapat memahami kondisi lokasi dengan lebih detail, terutama bila dibandingkan penulis meneliti di daerah-daerah lain. Sedangkan penentuan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampel* atau sampel bertujuan, yaitu penentuan informan yang didasarkan pada tujuan penelitian. Beberapa responden yang sudah saya wawancarai antara lain (1) 5 caleg perempuan (terpilih, tidak terpilih dan periode sebelumnya) yaitu Dwita Andriani, Ummul Hasanah, Zulfah, Endang Sri Rahayu dan Risqiyati, (2) tiga pengurus partai yaitu Faisal Muhlis selaku Sekjen PAN, Hunain Santoso selaku Ketua DPC PDI Perjuangan dan Mahsub selaku Wakil Ketua DPC Partai Gerindra, (3) M.Homaidi selaku tokoh lokal dan pengamat politik, dan (4) Rahem selaku wartawan Koran Madura di Sumenep.

⁴⁸ Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gama Univ. Press, 227), hlm 67.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu metode pokok dalam jenis penelitian kualitatif. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan tatap muka, dimana pihak pertama disebut pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak kedua disebut terwawancara yang memberikan jawaban.⁴⁹ Tujuannya, untuk menggali data dari informan guna memperkuat data penelitian. Bentuk wawancara yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan sistem terbuka dan tidak terstruktur. Bentuk wawancara jenis ini memberikan kemudahan bagi saya mengajukan pertanyaan secara bebas dan informan pun menjawab secara bebas namun tetap memperhatikan relevansi dengan tujuan penelitian.⁵⁰ Beberapa responden yang sudah saya wawancarai antara lain (1) 5 caleg perempuan (terpilih, tidak terpilih dan periode sebelumnya) yaitu Dwita Andriani, Ummul Hasanah, Zulfah, Endang Sri Rahayu dan Risqiyati, (2) tiga pengurus partai yaitu Faisal Muhlis selaku Sekjen PAN, Hunain Santoso selaku Ketua DPC PDI Perjuangan dan Mahsub selaku Wakil Ketua DPC Partai Gerindra, (3) M.Homaidi selaku tokoh lokal dan pengamat

⁴⁹ Lexy J. Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Kosdaya Karya, 2002), hlm 3.

⁵⁰ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm 233.

politik, dan (4) Rahem selaku wartawan Koran Madura di Sumenep.

Para informan pada umumnya ditemui di tempat kerja dan di rumahnya. Kegiatan wawancara dengan caleg terpilih lebih banyak dilakukan di kantor DPRD, dengan pengamat politik di tempat kerjanya (STAIN Pamekasan) sedangkan dengan pengurus partai dilakukan di kantor DPC partai masing-masing. Tetapi wawancara dengan caleg tidak terpilih dan caleg periode sebelumnya dilakukan di rumah informan, begitu juga wawancara dengan wartawan penulis mewawancarai di rumahnya karena pada saat itu yang bersangkutan kebetulan sedang libur kerja. Penulis merasakan kegiatan wawancara yang dilakukan di rumah informan lebih leluasa daripada di kantor kerjanya. Kegiatan wawancara yang dilakukan di tempat kerja terutama dengan caleg terpilih kurang begitu leluasa karena waktu yang tersedia tidak terlalu maksimal dan begitu banyak orang yang silih berganti masuk ruang kerja informan sehingga wawancara penulis sedikit terganggu.

Penting penulis kemukakan disini, salah satu pengalaman pahit yang membekas di benak panulis adalah saat wawancara dengan caleg terpilih yang saat ini menjadi anggota DPRD Sumenep. Selain waktu yang kurang maksimal dan tempat kerja yang kurang kondusif, penulis juga mengalami kejadian pahit. Saat

itu, ketika penulis hendak mewawancarai salah satu caleg terpilih, penulis dengan yang bersangkutan sepakat bertemu di kantor DPRD pukul 09.00 WIB. Tetapi saat penulis sudah berada di kantor DPRD pada pukul tersebut, tiba-tiba ia tidak dapat diwawancarai karena ada rapat. Akhirnya, penulis dengannya sepakat wawancara setelah rapat selesai yaitu sekitar pukul 15.00 WIB. Tetapi penulis seketika kaget, ia tiba-tiba menginformasikan bahwa dirinya sudah pulang ke rumah dan meminta maaf pulang cepat karena ada acara keluarga. Penulis baru bisa melakukan wawancara besok harinya dengan yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data skunder yang bisa memperkuat data-data primer. Metode dokumentasi adalah teknik pengambilan data dari dokumen, baik berupa buku, jurnal, arsip, dan foto.⁵¹ Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data wilayah, data statistik, foto-foto dan arsip-arsip yang mendukung fokus penelitian tentang *positioning* politik caleg perempuan di Sumenep. Dokumen-dokumen yang berhasil penulis dapatkan seperti dokumen pemilu dari KPUD Sumenep, peta wilayah dan dokumen caleg dari partai. Data-data tersebut dikumpulkan kemudian dipadukan untuk memperkuat data-data hasil wawancara.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 240.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah tahapan di dalam penelitian untuk memaparkan data-data sehingga diperoleh suatu hasil atau laporan penelitian. Analisis data kualitatif dapat dilakukan sejak awal turun ke lokasi saat melaksanakan pengumpulan data, dengan cara mengansur informasi, berbeda dengan analisis data kuantitatif yang harus dilakukan di akhir pengumpulan data.⁵² Tujuannya adalah untuk menganalisis proses berlangsungnya fenomena sosial agar dapat memperoleh gambaran yang tuntas terhadap fenomena tersebut, dan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses fenomena sosial itu.⁵³ Dengan begitu, dapat diperoleh hasil penelitian yang menggambarkan fakta di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-analitik, suatu proses penjabaran atas beragam data yang sudah didapat baik dari wawancara maupun dokumentasi dan dianalisis menggunakan teori *positioning* politik.⁵⁴ Proses analisis ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi data bertujuan untuk memperjelas temuan di lapangan dengan cara menyeleksi data-data relevan yang didapat dari wawancara maupun dokumentasi.⁵⁵ Data-data yang masih

⁵² Susanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2006), hlm 142.

⁵³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format – Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), hlm 153.

⁵⁴ John. W. Creswell, *Op. Cit.*, hlm 267.

⁵⁵ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006) hlm 22.

acak dipilah ke dalam beberapa kategori sesuai topik penelitian agar mudah dipahami dan mendapatkan data-data penting. Tanpa proses ini penyusunan hasil penelitian ini sulit dilakukan.

b. Penyajian Data

Hasil reduksi data kemudian penulis sajikan dalam bentuk deskripsi sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan.⁵⁶ Penyajian data dalam penelitian ini berupa teks naratif, tabel, grafik dan gambar yang berkaitan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan sambil mengelaborasi teori yang sudah ada terhadap data-data yang didapat di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Setelah data direduksi dan disajikan, kemudian penulis menarik kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan ini penulis sangat memperhatikan kevalidan penyajian data. Kevalidan data itu didukung oleh temuan-temuan yang kuat.⁵⁷

G. Sistematika Pembahasan

BAB I berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 23.

⁵⁷ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm 252.

BAB II berisi letak dan sejarah Sumenep, gambaran sosiologis kehidupan masyarakat Sumenep, penjelasan tentang posisi perempuan di masyarakat serta profil tiga caleg perempuan terpilih.

BAB III berisi deskripsi temuan-temuan dari lapangan meliputi sejarah politik perempuan di Sumenep, politik perempuan pada pemilu 2014 dilanjutkan dengan pembahasan tentang motif dan gaya politik perempuan.

BAB IV berisi analisis teoritik temuan-temuan dari lapangan meliputi segmentasi dan pilihan partai politik, *positioning* politik caleg perempuan pada pemilu 2014, sumber dan implementasinya, perbandingan antarcaleg yang lolos dan tidak lolos maupun dengan caleg periode sebelumnya, konstruksi gender serta peran partai politik dan tim sukses terhadap *positioning* politik caleg perempuan.

BAB V berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan strategi *positioning* politik sangat penting bagi caleg perempuan pada pemilu 2014 di Sumenep. *Positioning* politik berguna sebagai strategi mendekati pemilih, membentuk identitas, membedakan diri dan membangun pesan politik kepada pemilih. Strategi tersebut juga sangat menentukan keberhasilan para caleg perempuan pada pemilu 2014. Artinya, secara praktik strategi *positioning* politik banyak berpengaruh terhadap lolosnya tiga caleg perempuan di Sumenep seperti Dwita Andriani, Ummul Hasanah dan Zulfah. Sebagaimana dijelaskan di atas, ketiganya menggunakan strategi *positioning* politik untuk meraih kemengannya meskipun secara praktik implementasinya berbeda-beda.
2. Keberadaan strategi *positioning* politik dianggap penting mengingat persaingan politik perempuan bukan sekedar strategi kemenangan semata, tetapi juga ada kaitannya dengan hegemoni kultur patriarki di masyarakat. Strategi tersebut dianggap perlu karena perempuan terjun ke dunia politik lebih-lebih sebagai caleg dituntut untuk melawan belenggu patriarki. Hal ini yang tercermin dalam *positioning* politik

caleg perempuan pada pemilu 2014 di Sumenep. Para caleg perempuan menggunakan *positioning* sebagai satu-satunya strategi membuktikan diri, membangun *image*, mengidentifikasi diri dan tentunya menyadarkan masyarakat akan pentingnya peran perempuan. Tanpa *positioning* tentu sedikit kemungkinan bagi caleg perempuan lolos dalam pemilu.

3. Adanya posisi dan status perempuan yang masih surbordinat dalam kehidupan masyarakat Sumenep memang tidak dimungkiri bisa menjadi penghambat bagi tampilnya caleg perempuan dalam politik (pemilu). Kondisi semacam itu bisa membuat peluang caleg perempuan lolos dalam pemilu dangat kecil. Namun, bagi beberapa caleg perempuan Sumenep realitas tersebut justru dianggapnya sebagai tantangan untuk memacu langkah dan strategi. Oleh karenanya, mereka melakukan berbagai cara untuk membangun *image* agar stereotip yang selama ini ada di masyarakat dapat direkonstruksi. Atas dasar itulah strategi *positioning* politik dilakukan untuk mengidentifikasi diri dan terbukti pada pemilu 2014 strategi tersebut berhasil mengantarkannya lolos ke parlemen.
4. Adapun sumber-sumber *positioning* politik yang digunakan oleh caleg perempuan pada pemilu 2014 adalah:
 - a. Kualitas, kemampuan diri dan integritas
 - b. Kharisma atau ketokohan
 - c. *Track record* dan pengalaman

- d. Visi misi dan program
- 5. *Positioning* politik tersebut diimplementasikan melalui:
 - a. *Blusukan*, silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan hadir dalam kelompok-kelompok di masyarakat
 - b. Kegiatan sosial
- 6. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat *positioning* politik adalah:
 - a. Kultur masyarakat
 - b. Peran ganda perempuan
 - c. Keberanian perempuan
 - d. Biaya politik

B. Saran-Saran

Mencermati hasil penelitian di atas maka kiranya perlu penulis memberikan saran dan rekomendasi utamanya untuk kepentingan akademik sebagai berikut:

1. Penelitian ini tentu belum sempurna, karena itu bagi penelitian selanjutnya yang sejenis penulis berharap dapat mengkaji secara lebih komprehensif tentang pola gerakan politik perempuan. Asumsi yang berkembang selama ini bahwa pola politik perempuan cenderung tidak mandiri, selalu dikaitkan dengan figur tertentu di belakangnya. Penulis juga menemukan kenyataan tersebut dalam penelitian ini. Sebagian caleg perempuan masih tidak bisa mandiri untuk terjun dalam politik

(pemilu). Penulis berharap penelitian selanjutnya mampu secara spesifik mengkaji masalah ini.

2. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji topik tentang otoritas dan ruang publik perempuan di Madura. Penelitian ini dirasa penting mengingat perempuan Madura masih sangat stereotipikal. Sebagaimana ditemukan penulis bahwa dalam masyarakat seakan ada pewajaran tentang domestifikasi perempuan, pembagian kerja antara wilayah privat dan publik. Salah satu responden yang penulis temui bahkan mengatakan bahwa wilayah kerja perempuan tidak sebebaskan laki-laki. Laki-laki bisa 24 jam bekerja di luar tetapi perempuan seperti itu bisa menimbulkan asumsi-asumsi yang kurang baik dari masyarakat karena sejatinya perempuan diasumsikan berada di rumah mengurus rumah tangga saja.
3. Penulis menemukan dalam penelitian ini bahwa ada kaitan sangat erat antara politik dan agama. Beberapa caleg dengan latar belakang tokoh agama—pengasuh atau setidaknya keturunan pesantren—memiliki jaringan massa lebih unggul. Caleg elite agama ini sudah memiliki massa banyak tanpa harus melakukan berbagai macam strategi lain, cukup dengan mengandalkan kharismanya saja. Karena itu, penelitian selanjutnya disarankan dapat mengkaji masalah ini untuk mengungkap seberapa kuat hubungan agama dan politik di Madura secara umum atau di Sumenep secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman. 1971. *Sedjarah Madura; Selayang Pandang*. Sumenep: The Sun.
- ANTARANews Jatim. "Susahnya Cari Perempuan Raih Kursi DPRD Sumenep" dalam <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/133383/susahnya-cari-perempuan-raih-kursi-dprd-sumenep> [19/10/2014]
- Arimbi dkk (ed.). 1998. *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Balington, Julie (ed.). 2002. *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekadar Jumlah* (terj.). Jakarta: IDEA.
- Bangkalankab.go.id. "Komposisi Anggota DPRD Hasil Pileg 2014 Merata" dalam <http://bangkalankab.go.id/index.php/80-template-details/general/326-komposisi-anggotaan-dprd-hasil-pileg-2014-merata> [25/12/2014]
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial: Format – Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Cahyowati, RR. 2011. *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Ditinjau dari Prinsip Keadilan, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi* [desertasi]. Malang: Universitas Brawijaya.
- Coole, Diana. 1993. *Women in Political Theory*. New York: Harvester Wheatsheaf.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Muhidin M. (Ed.). 2001. *Postkolonialisme; Sikap Kita terhadap Imperialisme*. Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- de Jonge, Huub. 2011. *Garam, Kekerasan dan Aduan Sapi* (terj.). Yogyakarta: LKiS.
- _____. 1989. *Agama, kebudayaan, dan Ekonomi* (terj.). Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 1989. *Madura dalam Empat Zaman; Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam* (terj.). Jakarta: Gramedia.

- DetikNews. “Peran Perempuan dalam Pemilu 2014 Diharapkan di atas 30 Persen” dalam
<http://news.detik.com/surabaya/read/2013/11/25/122930/2422532/475/peran-perempuan-dalam-pemilu-2014-diharapkan-di-atas-30-persen?nd771104bcj> [19/10/2014]
- [DIKBUPARPORA] Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. 2012. *Sejarah Sumenep*. Sumenep: Dikbudparpora
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1996. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Fatmariza. 2005. “Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Sumatera Barat Pasca Kuota 30%” dalam Jurnal *DEMOKRASI*, Vol. IV No. 1.
- Geertz, Clifford. 1960. “The Javanese Kijaji: The Changing Role of A Cultural Broker” dalam *Comparative Studies in Society and History*. Vol. 2 No. 2. Januari.
- Fink, Hans. 2010. *Filsafat Sosial: dari Feodalisme hingga Pasar Bebas* (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [FK3] Forum Kajian Kitab Kuning. 2001. *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri*. Yogyakarta: LKiS.
- Harfin, Kurniawati M. 2012. “Pengaruh *Personal Branding* dan *Positioning* terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilukada di Kabupaten Bonebolango” dalam *Jurnal Politika* Vol. 3, No. 1 April. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Perempuan dalam Fiqih Politik*. Bandung: Mizan.
- Ihromi, T O (ed.). 1995. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ihsanudin. 2010. *Tan Malaka dan Revolusi Proletar*. Yogyakarta: Resist Book,.
- [IPU] International Parliamentary Union. “Women in Parliaments World Classification” <http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm> [19/10/2014]

- Kasiyan. 2008. *Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan*. Yogyakarta: Ombak.
- Kementerian Dalam Negeri [kemedagri]. "Profil Kabupaten Sumenep" dalam <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3529/sumenep>. [20/12/2014]
- Kompas.Com. "Caleg Perempuan Terpilih DPR 2014 – 2019 Menurun" dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/14/2144526/Caleg.Perempuan.Terpilih.DPR.Periode.2014-2019.Menurun> [19/10/2014]
- Kuntowijoyo. 2002. *Perubahan sosial dalam masyarakat agraris Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- _____. 1994. *Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Bentang.
- Kusumaningtyas, AD. 2004. "Pemilu 2004; Menagih Komitmen Parpol Islam untuk Demokrasi yang Berkeadilan Gender" dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 34. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Lovenduski, Joni. 2008. *Politik Berparas Perempuan* (terj.). Yogyakarta: Kanisius.
- Maloeng, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Kosdaya Karya.
- Mansurnoor, Iik Arifin. 1990. *Islam in an Indonesian World: Ulama' Madura*. Yogyakarta: UGM Press.
- Marching, Soe Tjen. 2011. *Kisah Dibalik Pintu; Identitas Perempuan Indonesia Antara yang Publik dan Privat*. Yogyakarta: Ombak.
- Moghissi, Haideh. 2005. *Feminisme dan Fundamentalisme Islam* (terj.). Yogyakarta: LKiS.
- Mudzar, M. Atho (ed.). 2002. *Women in Indonesian Society; Acces, Empowerment and Oppurtunity.*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- _____. 2001. *Wanita dalam Masyarakat Indonesia; Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Mufidah (ed.). 2010. *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN Maliki Press.

- _____. 2010. *Bingkai Sosial Gender; Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial*. Malang: UIN Maliki Press.
- Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Handari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gama Univ. Press.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2011. *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pemerintahn Kabupaten Sumenep. “Sejarah Raja dan Bupati” dalam sumenepkab.go.id [19/10/2014].
- [PUSKAPOL] Pusat Kajian Politik FISIP UI. “Analisis Perolehan Suara dalam Pemilu 2014; Oligarki Politik Dibalik Keterpilihan Caleg perempuan” dalam puskapol.ui.ac.id [19/10/2014].
- Rahman, Momin dan Stevi Jackson. 2010. *Gender and Sexuality; Sociological Approach*. Cambridge: Polity Press.
- Rifai, Mien A. 2007. *Manusia Madura; Pembawaan Prilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasanya*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern* (terj.). Jakarta: Kencana
- Rohim, Abd. 2013. *Problematisa Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2004-2009* [skripsi]. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Rosida, Karis. 2010. “Strategi Calon Legislatif Perempuan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009” dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 1, No. 1. Malang: Universitas Negeri Malang.

- Rosiena, Mari. 2013. "Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Malinau; Studi pada Anggota DPRD Kabupaten Malinau" dalam *eJournal Pemerintahan Integratif*, Vol. 1 No. 1, ejournal.pin.or.id. Samarinda: Fisip Universitas Mulawarman.
- Rozaki, Abdur. 2004. *Kharisma Menuai Kuasa*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- RRI.co.id. "Caleg Incumbent Kuasai Kursi DPRD Sampang" dalam http://www.rri.co.id/post/berita/79226/pemilu_2014/caleg_incumbent_kuasai_kursi_dprd_sampang.html [25/12/2014]
- Rush, Michael dan Phillip Althoff. 2008. *Pengantar Sosiologi Politik* (terj.). Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Sajogwo, Pudjiwati. 1985. *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Santoso, Widjajanti M. 2011. *Sosiologi Feminisme*. Yogyakarta: LKiS.
- Sardo. 2005. *Meruntuhkan Paham Sesat Kebangsaan: Pokok Pikiran Lenin dan Stalin*. Yogyakarta: Resist Book.
- Sastriyani, Siti Hariti. 2009. *Gender and Politis*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sayangi.com. "Inilah Caleg Terpilih Pamekasan yang Akan Dilantik 21 Agustus" dalam <http://www.sayangi.com/daerah1/read/25897/inilah-caleg-terpilih-pamekasan-yang-akan-dilantik-21-agustus> [25/11/2014]
- Soetrisno, Loekman. 1997. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Subadio, Maria Ulfa dan T. O. Ihromi. 1988. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Subhan, Zaitunah. 1999. *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKiS.
- Sukri, Sri Suhandjati. 2002. *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Susanto. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarbani, Syahrial dkk. 2011. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Tim Penulis Sejarah Sumenep (TPSS). 2010. *Sejarah Sumenep*. Sumenep: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga [DIKPARPORA].
- Utami, Nofi Sri. 2012. *Women's Law Politics Representativeness in Legislative Institutions Statutory Basis of the Republic of Indonesia of 1945 Era Reforms* [tesis]. Malang: Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Utami, Tari Siwi. 2001. *Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999 – 2001*. Yogyakarta: Gema Media.
- Weiner, Myron dan Joseph La Palombara. “Pengaruh Partai terhadap Perkembangan Politik dalam Miriam Budiardjo (ed.). 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wirosardjono, Soetjipto. 1996. *Dialog dengan Kekuasaan: Esai-esai tentang Agama, Negara dan Rakyat*. Bandung: Mizan.
- Wiyata, Al Latief. 2006. *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LkiS.
- Yayasan Jurnal Perempuan. 2004. *Modul Perempuan untuk Politik*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan Ausaid
- Zamroni, Imam. 2011. “Sunat Perempuan Madura; Belenggu Adat, Normativitas Agama dan Hak Asasi Manusia” dalam *KARSA*, Vol. 19 No. 2. Pamekasan: STAIN.



Lampíran - Lampíran...

DAFTAR RESPONDEN

1. Caleg perempuan:
 - Dwita Andriani (PAN)
 - Ummul Hasanah (PDI Perjuangan)
 - Zulfah (Partai Gerindra)
 - Endang Sri Rahayu (Partai Golkar)
 - Rachema (PDP)
 - Risqiyati (Partai Nasdem)
2. Pengurus partai (pengurus harian) :
 - Faisal Muhlis (Sekjen PAN)
 - Hunain Santoso (Ketua DPC PDI Perjuangan)
 - Mahsub (Wakil Ketua DPC Partai Gerindra)
3. Tokoh lokal/pengamat
 - M. Homaidi (Pengamat Politik Madura dan Dosen STAIN Pamekasan)
4. Wartawan
 - Rahem (Koran Madura)

DAFTAR PERTANYAAN (INTERVIEW)

Mengenai daftar pertanyaan penulis mengklasifikasikannya ke dalam dua kategori untuk memudahkan reduksi dan penyajian data : kategori fakta dan pendapat.

1. Tiga caleg perempuan terpilih

- Pertanyaan fakta :
 - Bisa Anda ceritakan karir politik Anda mulai dari mana, kemudian menjadi calon legislatif dan akhirnya terpilih?
 - Sebagai caleg perempuan pada pemilu 2014. Saat seleksi di partai, bagaimana sebenarnya proses yang terjadi? Bagi perempuan adakah kesulitan akses untuk masuk tahap seleksi itu?
 - Sejauh yang Anda lihat dalam proses seleksi, seberapa besar minat perempuan untuk ikut serta dalam pemilu?
 - Dalam pemilu, partai harus menyertakan minimal 30% perempuan dalam daftar calegnya. Apakah keseriusan partai mengakomodasi perempuan sebatas untuk tujuan itu?
 - Jika dibandingkan dengan calon laki-laki, bagaimana aksesnya sesuai yang Anda alami?
 - Adakah kriteria-kriteria khusus partai dalam memilih calon-calon perempuan?
 - Kemudian pada tahap kampanye, bisa Anda ceritakan bagaimana Anda mempromosikan diri ke pemilih?
 - Saat pemilu Anda harus menghadapi lawan politik Anda yang bukan hanya sesama caleg perempuan tetapi juga laki-laki. Sementara di masyarakat dominasi laki-laki masih sangat kuat. Bagaimana *positioning* politik yang Anda lakukan untuk menghadapi itu?
 - Mungkin bisa diceritakan tentang *positioning* politik yang Anda lakukan itu. Bentuknya seperti apa, pendekatannya mulai dari mana, dan sebagainya?
 - Stereotip tentang perempuan di masyarakat juga sangat beragam, komunikasi politik apa yang Anda sampaikan untuk meyakinkan masyarakat?
 - Sebagai caleg tentu Anda menyerap aspirasi masyarakat, apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat terhadap caleg perempuan seperti Anda? Atau respon apa yang disampaikan masyarakat kepada Anda sebagai caleg perempuan?
 - Dari 202 caleg perempuan, hanya tiga terpilih dan Anda termasuk salah satunya. Bila saya kaitkan dengan faktor *positioning* politik tadi, sejauh mana pengaruhnya pada kemenangan Anda itu?
 - Kalau partai yang mengusung Anda, apa kontribusinya pada kemenangan Anda?
 - Ataukah justru ada figur/tokoh lain di belakang Anda seperti saudara atau keluarga dan itu menguntungkan pada keterpilihan Anda?
- Pertanyaan pendapat :

- Bagaimana Anda melihat peran serta posisi perempuan selama ini di masyarakat?
- Apa yang Anda ketahui tentang perempuan terjun ke politik?
- Bagaimana Anda melihat keterwakilan perempuan di parlemen Sumenep secara kualitatif dan kuantitatif selama ini?
- Apa problemnya sampai saat ini keterwakilan masih rendah?
- Anda mengalami langsung proses seleksi di level partai. Menurut Anda sejauh mana keseriusan partai mengakomodasi perempuan?
- Terakhir, saran Anda untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik bagi para perempuan dan partai?

2. Pengurus partai

- Pertanyaan fakta :

- Bagaimana visi-misi partai terkait gender?
- Di level kepengurusan partai, seberapa besar keterwakilan perempuan saat ini? Mungkin bisa dijabarkan secara persentase dan posisi di kepengurusan.
- Pada Pemilu 2014, bisa diceritakan bagaimana partai melakukan seleksi terhadap calon-calon perempuan? Seperti tahap-tahapannya?
- Adakah kriteria tertentu partai dalam memilih caleg perempuan?
- Berdasarkan kalkulasi partai dari seleksi yang dilakukan, seberapa besar minat perempuan untuk ikut serta menjadi caleg pada pemilu 2014?
- Dalam pemilu, partai harus menyertakan minimal 30% perempuan dalam daftar calegnya. Apakah tujuan partai sebatas melengkapi formalitas kuota 30%??
- Seperti apa *follow up* partai terhadap kader-kader perempuannya? Ataukah berhenti sebatas merekrut saja?
- Saat kampanye pemilu 2014, bagaimana *positioning* politik partai terhadap partai-partai lain khususnya untuk mendorong keterpilihan caleg perempuannya?
- Apa yang ditunjukkan partai ke masyarakat bahwa caleg perempuan yang diusungnya pantas dipilih? Atau dengan kata lain apa kontribusi partai terutama terhadap kampanye caleg perempuannya?
- Kaitannya dengan calon laki-laki, apa sesungguhnya *positioning* partai agar caleg perempuan yang diusungnya tidak kalah “populer” dengan calon laki-laki?
- Di masyarakat dominasi laki-laki juga masih kuat. Bagaimana partai menghadapi itu? Apa yang dilakukannya?
- Pada pemilu 2014 partai berhasil memiliki 1 wakil perempuan di parlemen, sejauh mana kontribusi partai pada kemenangan 1 calonnya itu?

- Pertanyaan pendapat :

- Apa yang partai ketahui tentang peran serta posisi perempuan selama ini di masyarakat?

- Bagaimana partai melihat keterwakilan perempuan di parlemen Sumenep secara kualitatif dan kuantitatif selama ini?
- Hasil pemilu 2014 kalau dipersentasikan masih jauh dari target 30%, apa sesungguhnya problemnya dan bagaimana partai menyikapinya?
- Apa sebenarnya yang mesti dilakukan partai untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen?

3. Tokoh lokal/peneliti/wartawan

- Pertanyaan fakta :
 - Menurut yang Anda amati selama ini, bagaimana akses perempuan untuk terjun ke dunia politik, termasuk akses terlibat dalam pencalonan legislatif?
 - Kaitannya dengan partai, bagaimana visi-misi gender yang ada di partai?
 - Apa yang Anda ketahui tentang seleksi partai terhadap calon-calon perempuan.
 - Jika Anda amati adakah sebenarnya kriteria-kriteria khusus yang ditetapkan partai dalam seleksi calon perempuan?
 - Saat kampanye, bagaimana *positioning* politik caleg perempuan saat pemilu?
 - Kalau partai sendiri, menurut yang Anda amati saat pemilu adakah kontribusinya terhadap *positioning* politik para caleg-caleg perempuan?
 - Caleg perempuan terpilih pemilu 2014 di Sumenep hanya 3 orang. Apakah ada kaitan antara efektifitas *positioning* itu dengan keterpilihan mereka?
 - Kalau ada seperti apa kontribusi partai itu?
- Pertanyaan pendapat :
 - Apa yang Anda ketahui tentang peran dan posisi perempuan di masyarakat?
 - Bagaimana Anda membaca keterwakilan perempuan dalam politik selama ini khususnya di Sumenep?
 - Apa sesungguhnya problem dasar masih rendahnya keterpilihan dan keterwakilan perempuan di parlemen?
 - Sejauh mana keseriusan partai dalam mengakomodasi perempuan? Ataukah sebatas memenuhi kuota 30% saja?
 - Bila dibandingkan, seperti apa keberpihakan partai dalam mengakomodasi calon perempuan ketimbang calon laki-laki?
 - Hanya tiga caleg perempuan terpilih, selain *positioning* apakah ada faktor lain dibalik kemenangan mereka seperti partai atau faktor lain seperti keturunan?
 - Terakhir, menurut Anda apa yang harusnya dilakukan agar rnedahnya keterwakilan perempuan itu bisa diatasi?

SUSUNAN FRAKSI-FRAKSI DPRD SUMENEP

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

- a. Ketua Fraksi : H. Moh. Subaidi, SE. MM.
- b. Wakil Ketua : Drs. H. Mas'ud Ali
- c. Sekretaris : M. Syukri, SH
- d. Anggota : 1. Ahmad Salim, SH. i
2. KH. Syaiful Bari, S.Pd
3. Juhari, S.Ag
4. Ir. H. Akhmadi Said
5. Badrul Aini **(PBB)**

2. Fraksi Partai Amanat Nasional

- a. Ketua : H. Iskandar
- b. Wakil Ketua : Farid Affandi, S.Pd
- c. Sekretaris : Drs. H.A. Hosaini Adhim
- d. Anggota : 1. Faisal Muhlis, S.Ag
2. Dwita Andriani, S.Psi
3. Agus Rahman Budiharto, SE
4. Suharinomo, SH

3. Fraksi Partai Golkar

- a. Ketua : Drs. Ec. Iwan Budiharto
- b. Wakil Ketua : Rukminto, SH
- c. Sekretaris : A. Fajar Hari Ponto, SH
- d. Anggota : H. Fathor Rozi, S.Sos

4. Fraksi Partai Gerindra Sejahtera

- a. Ketua : Nurussalam
- b. Sekretaris : Mohammad Yusuf, SE **(PKS)**
- c. Bendahara : Hj. Zulfa
- d. Anggota : 1. Jonaidi
2. H. Suroyo, SE
3. Ahmad Muhlis
4. Jubriyanto **(PKS)**

5. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

- a. Ketua : Ir. Bambang Prayogi Rahardjo Eko F.
- b. Wakil Ketua : Darul Hasyim Fath
- c. Sekretaris : Abrary, S. Ag. M. Psi
- d. Anggota : 1. Hj. Ummul Hasanah
2. H. Zainal
3. Umar

6. Fraksi Partai Demokrat

- a. Ketua : H. Masdawi
- b. Wakil Ketua : R. Ach. Djoni Tunaidy
- c. Sekretaris : KH. A. Kurdi HA S. Pd
- d. Anggota : 1. Drs. Ahmad Jasuli
2. Indra Wahyudi, SE
3. Drs. H. Akhmad Zainur Rakhman
4. Drs. H. Mohammad Hanafi, MM

7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

- a. Ketua : H. Moh. Ruqi Abdillah, SH
- b. Wakil Ketua : Dul Siam, S.Ag M.Pd
- c. Sekretaris : Akis Jazuli **(NASDEM)**
- d. Bendahara : H. Herman Dali Kusuma, MH
- e. Anggota : 1. Abdul Hamid Ali Munir, SH
2. Nayatullah Bin Superrang
3. Abrori, S.Ag MM
4. Risnawi, SH
5. Rozah Ardhi Kautsar **(NASDEM)**
6. Imran **(HANURA)**
7. M. Ramzi, S.IP **(HANURA)**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

NO.	NAMA	J A B A T A N
1	2	3
1.	H. HERMAN DALI KUSUMA, MH	Ketua/Anggota
2.	Drs. H. MOHAMMAD HANAFI, MM	Wakil Ketua/Anggota
3.	AHMAD SALIM, SHi	Wakil Ketua/Anggota
4.	FAISAL MUHLIS, S,Ag	Wakil Ketua/Anggota
5.	H. MOH. RUQI ABDILLAH, SH	Anggota
6.	H. NAYATULLAH BIN SUPERRANG	Anggota
7.	H. RISNAWI, SH	Anggota
8.	ROZAH ARDHI KAUTSAR	Anggota
9.	Drs. Ec. IWAN BUDIHARTO	Anggota
10.	RUKMINTO, SH	Anggota
11.	R. ACH. DJONI TUNAIDY, S.Sos	Anggota
12.	KH. A. KHURDI HA, S.Pd	Anggota
13.	Drs. AKHMAD JASULI	Anggota
14.	M. SYUKRI, SH	Anggota
15.	Drs. H. MAS'UD ALI	Anggota
16.	Ir. H. AKHMADI	Anggota
17.	FARID AFFANDI, S.Pd	Anggota
18.	Drs. H.A. HOSAINI ADHIM, M.Si	Anggota
19.	AGUS RAHMAN BUDIHARTO, SE	Anggota
20.	NURUS SALAM	Anggota
21.	MOHAMMAD YUSUF, SE	Anggota
22.	Hj. SULFAH	Anggota
23.	Ir. BAMBANG PRAYOGI REF	Anggota
24.	H. ZAINAL ARIFIN	Anggota

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

NO.	NAMA	J A B A T A N
1	2	3
1.	H. HERMAN DALI KUSUMA, MH	Ketua/Anggota
2.	Drs. H. MOHAMMAD HANAFI, MM	Wakil Ketua/Anggota
3.	AHMAD SALIM, SHi	Wakil Ketua/Anggota
4.	FAISAL MUHLIS, S,Ag	Wakil Ketua/Anggota
5.	H. DUL SIAM, S,Ag, M.Pd	Anggota
6.	H. ABDUL HAMID ALI MUNIR, SH	Anggota
7.	M. RAMZI, S.IP	Anggota
8.	AKIS JAZULI	Anggota
9.	Drs. Ec. IWAN BUDIHARTO	Anggota
10.	AF. HARI PONTO, SH, MM	Anggota
11.	H. MOH. SUBAIDI, SE, MM	Anggota
12.	JUHARI, S,Ag	Anggota
13.	BADRUL AINI	Anggota
14.	H. MASDAWI	Anggota

15.	Drs. H. AKHMAD ZAINUR RAKHMAN	Anggota
16.	INDRA WAHYUDI, SE,M.Si	Anggota
17.	H. ISKANDAR	Anggota
18.	DWITA ADRIYANI, S.Psi	Anggota
19.	SUHARINOMO, SH	Anggota
20.	NURUS SALAM	Anggota
21.	JUBRIYANTO, S.Pd.I	Anggota
22.	ACHMAD MUKLIS	Anggota
23.	DARUL HASYIM FATH	Anggota
24.	ABRARY, S.Ag, M.Psi	Anggota

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI- KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

O.	KOMISI / NAMA	JABATAN
1	2	3
I.	KOMISI A 1. DARUL HASYIM FATH 2. KH. ABDUL HAMID ALI MUNIR, SH 3. Drs. H.A. HOSAINI ADHIM, M.Si 4. H. ABRORI, S.Ag, MM 5. H. SYAIFUL BARI, S.Pd 6. Hj. ZULFA 7. UMMUL HASANAH 8. R.ACHMAD JHONI TUNAI, S.SOs 9. ROEKMINTO, SH	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
II.	KOMISI B 1. NURUS SALAM 2. JUHARI, S.Ag 3. H. RISNAWI, SH 4. AKIS JASULI 5. BADRUL AINI 6. H. ISKANDAR 7. SUHARINAMO, SH 8. ACHMAD MUHLIS 9. Ir. BAMBANG PRAYOGI REF 10. H. MASDAWI 11. A. FAJAR HARI PONTO, SH, MM	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

III.	KOMISI C 1. H. DUL SIAM, S.Ag, M.Pd 2. DWITA ANDRIYANI, S.Psi 3. M. SYUKRI, SH 4. H. MOH. RUQI ABDILLAH, SH 5. M. RAMZI, S.IP 6. Ir. H. AKHMADI 7. AGUS RAHMAN BUDIHARTO, SE 8. MOHAMMAD YUSUF, SE 9. JONAIIDI, SE 10. H. ZAINAL ARIFIN 11. UMAR 12. Drs. H. ACHMAD ZAINURRAHMAN 13. KH. KURDI HA, S.Pd 14. INDRA WAHYUDI, SE, M.Si 15. Drs. Ec. IWAN BUDIHARTO	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
IV.	KOMISI D 1. H. MOH. SUBAIDI, SE, MM 2. ABRARI, S.Ag, M.Psi 3. IMRAN 4. H. NAYATULLAH BIN SUPERRANG 5. ROZAH ARDHI KAUTZAR 6. Drs. H. MAS'UD ALI 7. FARID AFFANDI, S.Pd 8. JUBRIYANTO, S.Pd.I 9. H. SOROYO, SE 10. Drs. ACHMAD JASULI 11. H. FATHOR ROZI, S.Sos	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA PRIBADI

Nama : **Miftahol Arifin**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
TTL : Sumenep, 5 Agustus 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Agama : Islam
Alamat (rumah) : Dsn. Garincang RT 02 RW 1 Desa Batang-Batang
Laok Kec. Batang-Batang Kab. Sumenep Madura
69473
(kost) : Gendeng GK IV/925 RT 84 RW 20 Baciro
Yogyakarta 55225
CP. : 089675334347
Email : selalumerindu@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

» Formal

1997 – 2003 : MI Taufiqurrahman Longos, Gapura
2003 – 2006 : MTs Taufiqurrahman Longos, Gapura
2006 – 2009 : MA 1 Annuqayah Guluk-Guluk,
2010 – Sekarang : Strata Satu Sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

» Non Formal

2005 : Kursus Bhs. Inggris di Gajah Mada English Course
Andulang, Gapura
2005 : Kursus Komputer di Ponpes Al-Karimiyah Beraji,
Gapura
2006 : Kursus Bhs. Inggris di Palapa English College
Sumenep

2006 : Kursus Bhs. Inggris di Bataal English Course Guluk-Guluk

C. PENGALAMAN ORGANISASI

2010 – 2012 : Jaringan Mahasiswa Sosiologi se-Jawa (JMSJ)
Yogyakarta

2010 : Keluarga Mahasiswa Madura Yogyakarta (KMMY)

2012 – 2013 : Div. P2SDK PMII Rayon Fishum UIN Sunan
Kalijaga

2012 – 2013 : Div. Advokasi BEM Sosiologi Fishum UIN Sunan
Kalijaga

2013 – 2014 : Div. Sos-Pol BEM Fishum UIN Sunan Kalijaga

D. PENGALAMAN KERJA

2009 : *Free Land Editor* di Matapena Yogyakarta

2012 : Magang Penelitian di Mukti Ali Institute (MAI)
Yogyakarta

E. KUALIFIKASI

- ✓ Advokasi
- ✓ Kemampuan komputer
 - MS Word
 - MS Excel
 - MS Power Point
 - MS Access
- ✓ Kemampuan Internet

Yogyakarta, 12 Januari 2015

Penulis,

Miftahol Arifin